

JEJAK PERDAGANGAN SENJATA API DAN AMUNISI ILEGAL

DI TANAH PAPUA



DISCLAIMER

Publikasi ini boleh direproduksi seluruhnya atau sebagian dan dalam bentuk apa pun untuk tujuan advokasi atau pendidikan atau nirlaba tanpa izin khusus dari pemegang hak cipta, asalkan mencantumkan sumbernya. Kutipan yang disarankan : Aliansi Demokrasi Untuk Papua(AIDP), Jejak Perdagangan Senjata Api dan Amunisi Ilegal di Papua, 2022.

Dengan alasan keamanan maka ada sejumlah narasumber yang meminta agar namanya tidak dicantumkan dengan jelas pada laporan ini sehingga kami menggunakan alias.

DAFTAR ISI

Daftar Isi	iv
Ucapan Terima Kasih.....	v
Technical inputs, review and comments.....	v
Tim Penyusun.....	vi
Pendahuluan.....	vii
Dasar Hukum Kepemilikan dan Penguasaan Senjata Api dan Amunisi di Indonesia.....	1
Dasar Hukum.....	1
Definisi Senjata Api dan Amunisi.....	5
Definisi Perdagangan Senjata Api dan Amunisi Secara Ilegal	8
PT Pindad - Indonesia.....	9
Matarantai Perdagangan Senjata Api dan Amunisi	12
Konflik Bersenjata Mengancam Perdamaian.....	12
Peristiwa PSAA Merupakan Fenomena Gunung Es	16
Jenis Senjata Api dan Amunisi yang Beredar di Papua	17
Asal Senjata Api dan Amunisi dari Luar Indonesia.....	22
Motif: Ekonomi, Binis dan Strategi	29
Banyak Uang Artinya Banyak Senjata.....	34
Jaringan, Jalur dan Keterlibatan Aparat Keamanan pada Perdagangan Senjata Api dan Amunisi	44
Jaringan dan Jalur.....	44
Keterlibatan Aparat Keamanan, Dimana Batasan antara Oknum dan Institusi?.....	50
Gap antara Berita dan Putusan Pengadilan.....	56
Cover Media Massa Cenderung Narasi Tunggal.....	56
Hukum Hanya Menjerat Para Pelaku di Lapangan	59
Kesimpulan.....	73
Rekomendasi.....	74

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada para narasumber yang telah menyediakan waktu dan informasi yang sangat berharga dan penting guna penulisan laporan ini, yakni:

- Sayid Fadhal Alhamid Kepala Pemerintahan Adat Dewan Adat Papua (DAP)
- Leonard Imbiri Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP), Direktur YADUPA
- Frits Ramandey, Sekretaris KOMNAS HAM Perwakilan Papua
- Kompol Tofan Irdianto, S.Sos., PS. Kasubdit 4 Kamneg Polda Papua
- Gustaf Kawer SH, MSi, direktus PAHAM Papua, Praktisi Hukum, Pengacara kasus PSAA
- Oktovianus Tabuni, SH, Praktisi Hukum, Pengacara kasus PSAA
- Marseus Tobing, SH, Praktisi Hukum, Pengacara kasus PSAA
- Helmi SH, Praktisi Hukum, Pengacara kasus PSAA
- Richardany Nawipa SH, direktur LBH TKP Nabire, Praktisi Hukum, Pengacara kasus PSAA
- Herman (bukan nama sebenarnya) di Wamena
- Irone (bukan nama sebenarnya), narapidana PSAA di Wamena
- Jordan (bukan nama sebenarnya), narapidana PSAA di Nabire
- Karlos (bukan nama sebenarnya), narapidana PSAA di Jayapura
- Jeremias (bukan nama sebenarnya), tokoh masyarakat Mee di Jayapura

Technical inputs, review and comments

Tim juga mendapatkan pandangan dan masukan saat Focus Group Discussion (FGD) Pra penelitian dan FGD hasil Penelitian dari sejumlah akademisi, tokoh adat, praktisi hukum dan jurnalis, oleh karenanya disampaikan terima kasih kepada:

- Sayid Fadhal Alhamid
- Leonard Imbiri
- Hamim Mustafa, S.I Kom, M.A.P
- Helmi SH,

- Weltemans Tahulending, SH
- La Mochtar Unu, S.Sos, Msi
- Melpayanti Sinaga S.I.P, M.A
- Apriani Anastasia Amenes, S,Sos, Msi
- Elvira Runkabu, S.IP., M.St.
- Prt Paramma MACT
- Richardany Nawipa, S.H
- Fabio Maria Costa, S.I.Kom
- Pares Wenda
- Bernard Koten

Penelitian ini disusun oleh Tim :

Analysis, drafting and study preparation

Latifah Anum Siregar dan Latifah Buswarimba Alhamid

Database development and data management

Mohammad Pieter Alhamid, Antonius Naiaki, dan Rosmina Windesi

Graphic design, layout and mapping

Johanis Wellikin

Terima kasih juga disampaikan kepada Kurawal Foundation yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

Sekali lagi, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan dukungan terkait investigasi ini.

Jayapura, 01 Juli 2022

PENDAHULUAN

Di Papua, konflik bersenjata terus meningkat dari tahun ke tahun, korban terbanyak berasal dari masyarakat sipil, berbagai profesi, usia, jenis kelamin, agama dan etnis khususnya orang asli Papua. Tidak ada perlindungan dan jaminan keamanan bagi masyarakat sipil di manapun mereka berada dan beraktifitas. Konflik ini telah mengancam upaya-upaya perdamaian di Papua, Indonesia dan dunia intermasional. Meningkatnya konflik berkaitan erat dengan meningkatnya perdagangan senjata api dan amunisi (PSAA) secara ilegal, setidaknya dalam 11 tahun terakhir (2011-2021).

Kasus PSAA melibatkan banyak pihak dari berbagai profesi yakni aparat(oknum)Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan oknum Polisi Republik Indonesia (POLRI), pelajar, mahasiswa, petani, anggota Komite Nasional Papua Barat(KNPB), Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat(TPNPB), legislator, Aparatur Sipil Negara(ASN) dan pekerja swasta. Kasus PSAA yang terungkap dan diproses secara hukum diyakini tidak sebanyak dari kasus yang sesungguhnya terjadi. PSAA menjanjikan secara ekonomi karena nilai transaksi yang fantastis mulai dari ratusan ribu hingga milyaran rupiah, juga ada dugaan motif lain seperti strategi untuk menguasai sumber daya alam(bisnis), karier dan kekuasaan(politik). Kuat dugaan, sejumlah bantuan dana dari pemerintah Indonesia menjadi sumber utama pembelian senjata api dan amunisi.

Ruang lingkup penelitian berfokus pada pemberitaan di media massa dan proses hukum yang dimulai dari tahapan penyelidikan hingga putusan di Peradilan Umum ataupun Peradilan militer. Tim peneliti telah melakukan wawancara ke sejumlah pihak yang terlibat dalam proses hukum sebagai terdakwa, terpidana, praktisi hukum (advokat) yang pernah menangani kasus tersebut serta sejumlah narasumber terdiri dari POLRI, Komnas HAM Perwakilan Papua, Dewan Adat Papua, akademisi, jurnalis dan masyarakat sipil. Lokasi penelitian di Jayapura, Wamena dan Nabire terkait sejumlah kasus yang terjadi di Jayapura, Wamena, Nabire, Timika, Biak, Serui, Merauke, Nduga, Pegunungan Bintang, Sorong dan Manokwari.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jaringan, jalur, para pihak yang terlibat, penanganan yang dilakukan oleh institusi penegak hukum mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan juga motif dan sumber dana PSAA.

I. DASAR HUKUM KEPEMILIKAN DAN PENGUASAAN SENJATA API DAN AMUNISI DI INDONESIA

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. UU ini pada pokoknya memuat 2 pasal, berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.”

Pada pasal 1 ayat (1) disebutkan : “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Pasal ini memiliki ruang lingkup yang sangat luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana. *Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak yang sah, maka digolongkan sebagai tindak pidana dengan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.* Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal atau unsur dari tindak pidana, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

Adapun Pasal 2, sebagai berikut:

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata

penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi- tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang- barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).¹

Dalam Pasal 2 ayat (1) dirumuskan perbuatan yang merupakan tindak pidana, sedangkan dalam Pasal 2 ayat (2) dikemukakan pengecualian terhadap istilah "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang digunakan dalam Pasal 2 ayat (1).

Dengan demikian, istilah "senjata tajam" hampir identik dengan "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk". Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pengaturan senjata tajam dalam Pasal 2 ayat (1) yang menggunakan istilah "senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" (*slag-, steek-, of stootwapen*), dan bagaimana penerapannya dalam praktik pengadilan. Meskipun dikatakan tidak merupakan bagian untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) namun fakta di Papua, sebagian masyarakat yang menggunakan kampak, misalnya untuk menebang pohon, diadili ataupun yang membawa parang dan panah untuk kepentingan bertani atau berkebun. Apalagi ketika dilakukan penyisiran terhadap suatu peristiwa kemudian di rumah seseorang ditemukan panah, maka diamankan untuk dijadikan Barang Bukti(BB). Padahal dalam budaya Papua, panah bagian dari 'kelengkapan keluarga untuk menunjukkan mereka bagian dari masyarakat adat atau penduduk setempat'.

¹Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang- Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 78).

2. UU No 8 tahun 1948

Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan.

Menurut Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu No 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Pada Perpu ini, kewenangan bukan pada Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1948.

Pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No.Pol : Skep/82/II/2004.

Artinya kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Bagi masyarakat sipil yang memiliki senjata api tanpa izin akan dikenakan sanksi pidana hingga hukuman mati. Lebih jauh lagi, penyalahgunaan senjata api ilegal mengancam keamanan dan stabilitas negara.²

²<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/pembatasan-kepemilikan-senjata-api-oleh-masyarakat-sipil-dalam-perspektif-hukum-dan-sanksi-pidana-atas-penyalahgunaannya/>

3. Peraturan Kapolri (PERKAP) No 18 tahun 2015

Di dalam PERKAP Nomor 18 tahun 2015 terdapat 3 macam senjata api yang boleh dimiliki masyarakat sipil yang sudah memenuhi persyaratan. Yakni senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api gas air mata.

Untuk senjata api peluru tajam, dibatasi untuk Senapan berkaliber 12 GA serta pistol berkaliber 22,25 dan 32. Sedangkan senjata api peluru karet dan peluru gas dibatasi untuk peluru berkaliber 9 mm.

Di Indonesia, Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKSHA) merupakan organisasi terkait dengan penggunaan Senjata Api berijin. PERIKSHA memiliki kewajiban memberikan pengetahuan, bimbingan dan pembinaan kepada pemilik izin khusus senjata api beladiri agar tidak melanggar peraturan dan taat pada ketentuan yang berlaku. Para pemilik juga harus mahir atau mampu menguasai penggunaan senjata bela diri yang dimilikinya itu, serta tahu tata cara penggunaannya agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain.³

Berdasarkan Pasal 4 PERKAP No. 18 Tahun 2015, jenis senjata api nonorganik Polri/TNI meliputi senjata api peluru tajam, senjata api peluru karet, dan senjata api peluru gas. Selain senjata api nonorganik Polri/TNI ada juga benda-benda yang menyerupai senjata api yang dapat digunakan untuk kepentingan bela diri, yaitu berupa semprotan gas air mata dan alat kejut listrik.

Pasal 8 dan Pasal 9 PERKAP No. 18 Tahun 2015 mengatur tentang persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan senjata api nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri seperti halnya berusia paling rendah 24 tahun, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri, memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri, lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda.

Pasal 11 Perkap No. 18 Tahun 2015 menyatakan bahwa jumlah senjata api nonorganik Polri/TNI yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap warga negara untuk kepentingan bela diri paling banyak 2

³<https://news.detik.com/berita/d-5110681/ketua-mpr-dorong-polisi-tindak-tegas-perdagangan-senjata-api-ilegal>

(dua) pucuk. Bagi perorangan yang telah memiliki senjata api nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri melebihi 2 (dua) pucuk, wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada orang lain yang memenuhi persyaratan. Dalam hal pemilik tidak menyerahkan kelebihan senjata api untuk disimpan di gudang Polri atau tidak menghibahkan kepada orang lain, maka surat izin tidak dapat diterbitkan dan kepemilikan senjata api dinyatakan tidak sah.

Pasal 13 UU No. 8 Tahun 1948 memberikan pembatasan atau hukuman kepada pemilik senjata api yang menyalahgunakan penggunaan senjata api yaitu dengan mencabut surat izin kepemilikan senjata api. Hal inipun selaras dengan Pasal 29 Perkap No. 18 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa bagi pemegang surat izin senjata api nonorganik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan surat izin pemilikan dan kartu surat izin penggunaan senjata apinya dicabut. Dikarenakan pada persyaratan yang diwajibkan oleh Perkap No. 18 Tahun 2015 diwajibkan bagi pemohon (pemilik senjata api) untuk membuat surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan senjata api nonorganik Polri/TNI. Kemudian akibat dari penyalahgunaan kepemilikan senjata api, Pasal 29 ayat (3) Perkap No. 18 Tahun 2015 menyatakan bahwa bagi pemilik yang pernah terlibat tindak pidana dan/atau penyalahgunaan senjata api, tidak dapat diberikan penggantian surat izin pemilikan dan tidak dapat diberikan

B. DEFINISI SENJATA API DAN AMUNISI

Senjata Api

Senjata api, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dan sebagainya.”⁴

⁴W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 2012, hal. 917

Defenisi lain dari senjata api adalah suatu alat yang terbuat dari logam atau *fiber* digunakan untuk melontarkan peluru/proyektil melalui laras kearah sasaran yang dikehendaki, sebagai akibat dari hasil ledakan amunisi.⁵

Amunisi

Amunisi adalah suatu rangkaian komponen dan bahan kimia yang dapat menimbulkan api maupun ledakan. ⁶

Defenisi lain dari amunisi sebagai dalam kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : 1. bahan pengisi senjata api (seperti mesiu, peluru); **2** bahan (alat) peledak yang ditembakkan kepada musuh (seperti bom, granat, roket)

Senjata Api Standar Militer⁷

Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI dalam rangka pelaksanaan tugas pertahanan negara dengan caliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.

Senjata Api Non Standar Militer⁸

Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olah raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan caliber laras di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.

⁵Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Kolonel Wahyu Wibowo, S.H, 2011: hal.10. Laporan Akhir Pengkajian Hukum tentang Penggunaan Senjata Api dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer dan Sipil.

⁶*Ibid*

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

Adapun Perserikatan Bangsa-Bangsa pada *UN Panel of Governmental Experts on Small Arms 1997* telah mendefinisikan senjata api yakni “senjata-senjata yang khusus dibuat dengan spesifikasi militer dan didesain untuk digunakan secara perorangan”. Senjata api dapat dianggap sebagai senjata ringan yang bersifat konvensional dan dapat dibawa oleh seorang individu atau combatant, seperti pistol dan senjata api yang di dalam penggunaannya tidak diperlukan latihan secara khusus dan mendasar karena dapat dipelajari dengan mudah.⁹

Departemen Informasi Publik PBB mendefinisikan *small Arms and Light Weapons (SALW)*. *Small Arms* didefinisikan sebagai senjata yang didesain khusus untuk penggunaan pribadi, sementara *Light Weapons* adalah senjata yang didesain untuk penggunaan beberapa orang yang beraksi sebagai sebuah kesatuan. Contoh *Small Arms* dapat termasuk pistol revolver dan otomatis, senjata laras panjang, dan senjata mesin ringan. Sementara contoh *Light Weapons* dapat termasuk senjata mesin berat, mortar, granat tangan, peluncur granat, senjata anti tank dan anti pesawat.¹⁰

Pertama kalinya isu spesifik peredaran senjata api menjadi topik pembicaraan negara-negara ASEAN pada tahun 2000, dimana *Regional Centre for Peace and Disarmament in The Asia And The Pacific* PBB mensponsori *The Jakarta Regional Seminar on Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons*. Pada kegiatan tersebut, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat regulasi domestik, pertukaran informasi intelijen, dan penguatan kontrol perbatasan dan imigrasi dalam upaya untuk mengentaskan peredaran senjata api di kawasan Asia Tenggara.¹¹

ASEAN akhirnya membakukan kebijakan regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bentuk Rencana Aksi (*Plan of Action*) to *Combat Trans-national Crime* yang termasuk mencantumkan regulasi mengenai perdagangan senjata. Namun, karena sifat dasarnya yang bukan merupakan perangkat hukum yang mengikat, instrumen ini

⁹United Nations Development Programme, *How to Guide Small Arms and Light Weapons Legislation*, Bureau for Crisis Prevention & Recovery, Geneva, 2008.

¹⁰Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Kolonel Wahyu Wibowo, S.H, *Op.cit.*

¹¹*Ibid.*

dipandang tidak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap peredaran senjata di kawasan Asia Tenggara.¹²

C. DEFINISI PERDAGANGAN SENJATA API DAN AMUNISI SECARA ILEGAL

Perdagangan senjata ilegal didefinisikan oleh Komisi Pelucutan Senjata PBB sebagai perdagangan yang melanggar hukum nasional ataupun hukum internasional (illegal). Definisi ini memunculkan kemungkinan dua jenis pasar senjata ilegal, yakni "*Grey Market* dan *black market*". *Gray Market* merujuk pada situasi dimana perdagangan terjadi dengan sepengetahuan pemerintahan nasional, walaupun mungkin melanggar aturan internasional. Sementara *Black Market* adalah merujuk pada perdagangan yang terjadi yang sepenuhnya diluar kontrol pemerintahan nasional.¹³

Dalam Konvensi PBB di Palermo disebutkan bahwa yang termasuk *Transnational Crime* adalah pencucian uang, korupsi, perdagangan gelap tanaman dan satwa liar yang dilindungi, kejahatan terhadap benda seni budaya (*cultural property*), perdagangan manusia, penyelundupan migran serta produksi dan perdagangan senjata api.¹⁴ Seiring perkembangan jaman, terdapat berbagai kejahatan lintas negara lainnya yang perlu ditangani secara bersama dalam kerangka multilateral, seperti kejahatan pencurian dan penyelundupan obyek-obyek budaya, perdagangan organ tubuh manusia, environmental crime (seperti *illegal logging* dan *illegal fishing*), *cybercrime* dan *identity's-related crime* yang dicantumkan dalam *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)*.¹⁵

Di Indonesia sendiri, aktifitas perdagangan senjata terdiri dari tiga jenis. Jenis perdagangan senjata yang pertama adalah *Trafficking in new firearms*, dimana dalam perdagangan senjata ini jelas proses produksi

¹²*Ibid.*

¹³<https://ajiepgozali.wordpress.com/2009/01/07/apa-itu-perdagangan-senjata-illegal/>, diupload pada Senin, 11 Oktober 2021, Pukul 10:00 WIT.

¹⁴Kementerian Luar Negeri, Kejahatan Lintas Negara, <http://www.kemlu.go.id/Pages/IssueDisplay.aspx?IDP=20&l=id>

¹⁵UNODC, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto,

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica//organisedcrime/united_nations_convention_against_transnational_organized_crime_and_the_protocols_thereto.pdf

hingga proses distribusinya. Selain itu perdagangan senjata jenis ini dilengkapi dengan dokumen resmi serta melibatkan Negara sebagai transaktor.

Berikutnya adalah *Trafficking in secondhand firearms*, yakni perdagangan senjata dengan dokumen yang tidak resmi serta tidak jelas siapa produsennya. Meskipun dilengkapi dengan dokumen, mayoritas dokumen tersebut sudah kadaluarsa. Aktor yang berperan sebagai transaktor pun bukan lagi negara, namun lebih kepada organisasi-organisasi maupun kelompok yang memperjual belikan senjata dengan pemerintah sebagai perantara. Yang ketiga yakni *Trafficking in stolen firearms*, dimana perdagangan senjata jenis ini tanpa dilengkapi dengan dokumen. Asal senjatanya pun berasal dari sisa rampasan perang, ataupun *homemade firearms*. Transaktor dalam perdagangan senjata jenis ini adalah kelompok-kelompok separatis dan teroris.¹⁶

Di Indonesia defenisi senjata api dan amunisi illegal menggunakan dalam UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 : 'yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak.'

D. PT PINDAD - INDONESIA

Dari situs resmi PT Pindad (<https://pindad.com/weapon>) dijelaskan bahwa PT Pindad (Persero) sejak berdiri tahun 1983 sebagai perusahaan penyedia peralatan pertahanan dan keamanan di Indonesia telah memproduksi berbagai jenis senjata mulai dari senjata laras panjang, senjata genggam, pistol, dan lainnya. Setiap produksi diutamakan untuk menyuplai kebutuhan peralatan pertahanan dan keamanan nasional serta untuk memenuhi pemesanan dari pihak lain. Seluruh produk telah diuji dan memenuhi standar internasional salah satunya Mil STD.

¹⁶Direktorat Reserse Kriminal, Laporan Tahunan Unit Kerjasama Luar Negeri Direktorat Reserse dan Kriminal (Jakarta, Mabes Polri: DirReskrim, 2012), 13

Senjata Pindad memiliki akurasi yang baik dan ketahanan di medan peperangan sesuai dengan kebutuhan pertahanan dan keamanan. Beberapa senjata telah berhasil meraih prestasi lomba tembak antar angkatan darat se-Asia Tenggara (AARM) dan lomba tembak Angkatan Darat se-Asia Pasifik (ASAM), serta Lomba Tembak tahunan yang diselenggarakan oleh Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (BISAM).

PT Pindad (Persero), memproduksi berbagai varian amunisi kaliber kecil, kaliber besar, dan kaliber sedang mulai dari kaliber 5.56 mm hingga amunisi artileri 105 mm serta berbagai varian granat. Pindad terus melakukan ekspansi produksi amunisi dan mengembangkannya sesuai dengan perkembangan teknologi senjata-senjata yang semakin beragam. Keunggulan dari amunisi Pindad adalah memiliki banyaknya varian yang dapat disesuaikan dengan jenis senjata dan hasil tembakan yang diinginkan.

PT Pindad memiliki beberapa anak perusahaan seperti PT.PEI (Pindad Enjiniring Indonesia) seperti yakni Perusahaan yang bergerak dalam bisnis produk industri. Beberapa bidang pekerjaan yang dijalani diantaranya manufaktur, perniagaan/perdagangan, percetakan, jasa pariwisata, perhotelan, jasa penyewaan excavator serta kelengkapan militer non-lethal. Kemudian PT Pindad Medika Utama yakni Rumah Sakit Pindad yang melayani *captive market* (intern) yaitu PT. Pindad, juga melayani *non captive market* (ekstern) yang terdiri dari beberapa perusahaan swasta fokusnya bidang pelayanan kesehatan. Kemudian ada PT PGST (*Pindad Global Sources and Trading*) memiliki kemampuan dan pengetahuan sebagai pemasok umum dan kontraktor untuk memberikan layanan perdagangan. PGST memiliki agen untuk Produk Pertahanan, Keamanan, Industri, Listrik, Telekomunikasi dan Kereta Api. Produk unggulan PT PGST antara lain: PG TZ1, PG BT1, PG Alpha-1, *Platform Intrusion Emergency Stop System*. Serta PT PIL (Pindad International Logistic) yang bergerak dalam bidang penyediaan jasa logistik terpadu. Bentuk layanan meliputi manajemen logistik, pergudangan dan zona terbatas logistik, bea cukai, serta transportasi logistik. PT.PIL menyediakan jasa antara lain: Angkutan laut, Angkutan udara, Layanan bea masuk, Transportasi dan distribusi darat, Pergudangan dan pengemasan, Sarana pemindahan dan relokasi pindah, Kargo proyek, ukuran besar dan beban berat, Pameran dan acara event.

Adapun penyebutan kaliber, umum untuk menyatakan ukuran peluru yang dipakai pada senjata api. Kaliber dilihat dari diameter atau garis tengah peluru, atau dari diameter inti lorong laras. Kaliber dapat dinyatakan dalam inci maupun dalam milimeter. Biasanya penyebutan dalam inci dipakai untuk produk komersial, dan penyebutan dalam milimeter untuk produk militer. Dalam inci, kaliber disebut dalam desimal dan mampu ditambahkan satuan kaliber "*cal*". Aci untuk peluru dengan diameter 0,45 inci biasa disebut .45 cal ("kaliber empat-lima"). Dalam milimeter kaliber tidak diberi satuan *cal*, untuk peluru 5,56 milimeter disebut 5.56 mm.

Pada generasi belakang, setelah dirancangnya senapan yang diisi peluru dari belakang senapan yang dinamakan senjata jarum oleh Pauly dan dipakai pertama kali oleh tentara Prusia yang waktu di bawah perdana menteri Otto von Bismarck dan Kaiser Wilhelm I itu ketika menyerang Perancis yang waktu itu dipimpin oleh Kaisar Napoleon III serta pengembangan-pengembangan senapan dan peluru di mana bubuk mesiu diisi ke dalam tabung kecil kuning yang dinamakan selongsong atau *cartridge*.

Penyebutan lain juga mampu dengan ditambahkan negara asal, tipe senjata, atau pabrik yang pertama memproduksi, misalnya:

- 5.56 x 45 mm, mampu disebut 5.56 NATO, .223 Rem
- 7.62 x 39 mm, mampu disebut 7.62 Soviet, 7.62 Warsaw, 7.62 ComBloc, .30 Short Russian
- 7.62 x 51 mm, mampu disebut 7.62 NATO, .308 Winchester
- 9 x 19 mm, mampu disebut 9 mm NATO, 9 mm Luger, 9 mm Parabellum
- 11.43 x 23 mm, biasa disebut .45 ACP, .45 Auto

Kaliber sebagai ukuran panjang laras dimana Panjang laras (biasanya pada senjata api dan meriam yang besar) juga dapat dihitung dalam kaliber. Panjang efektif laras akan dibagi dengan diameter lorong laras. Sebagai contoh, meriam pada kapal perang kelas Iowa disebut meriam kaliber 16"/50. Maksudnya, diameter inti larasnya 16 inci, dan panjang larasnya adalah 800 inci ($16 * 50 = 800$). Lebih kurang ini kadang-kadang diberi awalan L/, misalnya pada meriam tank Panzer

IV, yaitu "75 mm L/48", yang berguna diameternya adalah 75 mm dan panjangnya adalah 3600 mm.¹⁷

II. MATARANTAI PERDAGANGAN SENJATA API DAN AMUNISI

A. KONFLIK BERSENJATA MENGANCAM PERDAMAIAN

Daerah konflik atau pasca konflik menjadi tempat yang subur untuk PSAA sebagaimana laporan dari *United Nation On Drugs And Crime* tahun 2020 yang berjudul *Global Study On Firearms Trafficking 2020* yang menyebutkan : ¹⁸

In conflict and post-conflict countries, the accumulation of legal stockpiles of weapons may create the potential for firearms to reach the hands of non-state armed groups, other criminal groups or even the general population, especially if that very conflict weakens the ability of the state infrastructure to manage those stockpiles properly. (Di negara-negara konflik dan pasca-konflik, penumpukan stok senjata legal dapat menciptakan potensi senjata api untuk sampai ke tangan kelompok bersenjata non-negara, kelompok kriminal lain atau bahkan masyarakat umum, apalagi jika konflik itu justru melemahkan kemampuan infrastruktur negara untuk mengelola timbunan tersebut dengan baik).

Di Indonesia situasinya menjadi jauh lebih kompleks, dimana Indonesia berada di negara-negara pasca perang seperti Myanmar dan Philipina sementara Papua (setelah Aceh, Timor Leste, Ambon dan Poso) menjadi wilayah konflik terpanjang yang terus berkejolak hingga saat ini. PSAA yang illegal bukan saja terjadi dari luar negara Indonesia akan tetapi juga merupakan hasil transaksi dalam negeri yang melibatkan sejumlah oknum TNI dan POLRI terutama sebagai penyedia senjata api laras panjang. Hal ini dikarenakan permintaan senjata api laras panjang lebih tinggi daripada senjata api laras pendek.

Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa peredaran senjata api laras pendek illegal cukup banyak beredar di kota-kota di Papua yang dipakai oleh oknum tertentu dengan alasan untuk jaga diri, namun penanganannya 'tidak seserius' ketika transaksi senjata api yang

¹⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Kaliber_peluru

¹⁸Global Study On Firearms Trafficking 2020, United Nation On Drugs And Crime, Vienna

diindikasikan ada hubungannya dengan kelompok bersenjata yakni TPNPB dari Organisasi Papua Merdeka(OPM).

Banyaknya senjata api laras pendek yang beredar di Papua dapat dilihat pada data yang dimiliki Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Papua diketahui saat ini ada sekitar 500an senjata ilegal jenis Air Soft Gun beredar di Papua. Ketua Perbakin Papua, John Banua Rouw mengatakan Perbakin punya ijin dan senjata itu digunakan untuk olahraga. Di Pegunungan Tengah senjata ilegal lebih banyak dibanding Jayapura. Diketahui kurang lebih 60 senpi termasuk *Air Soft Gun* tanpa ijin yang beredar tetapi belum memiliki data terkait jumlah senpi. Di Papua sendiri yang memiliki ijin dari Pengda Perbakin dan Polda Papua tidak sampai 100 tetapi senjata jenis *Air Soft Gun* yang beredar hampir 500an.¹⁹

Sebagai wilayah konflik maka penempatan pasukan non organik TNI dan POLRI bertambah secara signifikan sejak 5 tahun terakhir. Misalnya pada laporan tahunan AIDP tahun 2019 menunjukkan sepanjang tahun 2019 setidaknya ada 6.000 sampai dengan 6.300 aparat keamanan khususnya saat merespon aksi anti rasisme di Papua atau ditahun 2020-2021 terkait persiapan dan penyelenggaraan PON XX ada lebih dari 21 ribu aparat keamanan gabungan TNI dan POLRI. Di tahun ini(2022) hingga semester pertama bulan Juni diperkirakan lebih dari 3.000 aparat non organik telah didatangkan ke Papua. Aparat keamanan ini difokuskan pada wilayah terpencil dimana interaksi antara masyarakat sipil setempat dengan aparat TNI dan POLR(orang luar) adalah hal yang asing dan mengkhawatirkan. Perbedaan budaya dan minimnya pemahaman mengenai konteks Papua memperburuk relasi antara aparat keamanan dengan masyarakat setempat. Meski ada perubahan kebijakan dari keamanan dari Operasi Nemangkawi menjadi Operasi Damai Cartenz dipenghujung tahun 2021, namun tidak mengubah cara negara mendekati rakyatnya.

Di waktu yang bersamaan, TPNPB mengalami peningkatan jumlah kelompok secara signifikan dengan sistem komando yang menyebar di beberapa tempat. TPNPB dalam berbagai pemberitaan sering disebut dengan istilah KKB dan KKSB, istilah ini pun berubah-ubah tergantung media massa dan narasumber berita. Pasca penembakan

¹⁹<https://jubi.co.id/500-senjata-air-soft-gun-ilegal-beredar-di-papua/> Diupload pada 25 Oktober 2020: pukul 07:29.

terhadap Kabinda Papua tanggal 25 April 2021 Menkopolhukam menetapkan KKB(TPNPB) sebagai kelompok teroris pada 29 April 2021. *Labeling* ini dinilai kurang tepat mengingat TPNPB merupakan sayap militer dari OPM dengan tujuan pembebasan Papua Barat. Selain itu target aksinya tidak dilakukan secara acak. Ada fokus pada kelompok atau individu tertentu. Meskipun target terhadap individu tertentu masih harus didalami lagi mengingat situasi yang sulit dan dilematis yang dihadapi oleh masyarakat sipil yang berada di wilayah konflik. Kini penyebutannya (TPNPB) masih berbeda-beda. Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi sekaligus juru bicara BIN, Wawan Hari Purwanto, menyebut Kelompok Separatis dan Teroris(KST)²⁰ pada Juni 2021 Kasatgas Humas Ops Nemangkawi Kombes Iqbal Alqudusy menyebut Kelompok Kriminal Teroris Bersenjata(KKT.²¹ Pada September 2021, Pangdam XVII Cenderawasih menyebut KSB.²² Pada September 2021, Kapolri menyebut KKB, KKSB (kelompok kriminal separatis bersenjata).²³ Adapun media massa sendiri lebih cenderung menyebut KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata). Penyebutan yang berbeda terhadap TPNPB ini sudah lama terjadi seperti GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), KSB (Kelompok Sipil Bersenjata). Bahkan dulu orang cukup menyebut dengan "OPM". Pada perkembangan selanjutnya, kantor Menkopolhukam sendiri dalam surat terbarunya juga menggunakan istilah TPNPB. *Labeling* ini juga tidak mampu mengakhiri konflik bersenjata antara TNI/POLRI dengan TPNPB.

Intensitas konflik bersenjata meningkat dan meluas, berada di ruang-ruang publik hingga mengorbankan masyarakat sipil. Hal ini menandakan bahwa TPNPB juga memiliki persenjataan dan amunisi. Meskipun dalam konteks hukum Indonesia, TPNPB adalah kelompok yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia(NKRI) ironisnya kasus terbanyak dari PSAA dalam negeri justru melibatkan oknum TNI dan POLRI, selain senjata dan amunisi yang didapat TPNPB dari penyerangan terhadap pos TNI atau POLRI.

²⁰<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56889526>

²¹<https://www.merdeka.com/peristiwa/buru-kelompok-teroris-di-papua-tni-polri-lumpuhkan-1-orang.html>

²²<https://news.detik.com/berita/d-5715291/pangdam-ungkap-teroris-kkb-papua-bawa-5-senpi-buatan-as-dari-png>

²³<https://www.liputan6.com/news/read/4691456/kapolri-minta-polisi-dan-prajurit-tni-waspadai-kkb-papua-jelang-akhir-tahun>

Praktisi Hukum sekaligus direktur LBH Talenta Keadilan Papua (LBH TKP) di Nabire, Richardany Nawipa, SH sependapat dengan sekretaris DAP, Leo Imbiri yakni bahwa perlu memahami berbagai gerakan bersenjata yang mengusung 'pro kemerdekaan Papua' sebab ada beberapa versi dari kelompok TPNPB. Pertama merupakan kelompok TPN murni yang memiliki aspirasi merdeka sebagai sayap militer dari OPM untuk memperjuangkan pembebasan dari NKRI. Kelompok ini mengutamakan pengamanan (keselamatan) rakyat (sipil) lebih kuat daripada penciptaan konflik. Juga memiliki struktur komando dan pendidikan politik. Sebagian besar TPNPB lahir karena persoalan ideologi (Papua Merdeka) bercampur dengan situasi ketidakadilan, dendam atau amarah. Ada juga TPNPB yang digunakan untuk kepentingan pihak tertentu, kelompok ini main didua kaki alias *double standard* untuk memenuhi kepentingan *user*. Kepentingan yang diusung beragam, misalnya (TPNPB) digunakan sebagai alat oleh pihak yang akan diproses hukum atau pihak yang tidak ingin kekuasaannya diganggu.²⁴

Menurut Frits Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, aksi kekerasan yang massif dilakukan oleh kelompok TPNPB mulai terjadi pada tahun 2000 setelah sejumlah pelatihan yang dilakukan oleh Satgas Papua di Papua dan di luar Papua. Di waktu yang sama, ada sejumlah anggota TNI/Polri yang disersi yang kemudian ikut bergabung dengan TPNPB. Mereka yang sudah mengikuti latihan militer kemudian melakukan aksi, untuk itu mereka memerlukan senjata api dan amunisi. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mulai tahun 2005 sejumlah senjata api aparat keamanan mulai dibeli atau dirampas. Konflik bersenjata mulai lebih intens dan massif diberbagai daerah pada tahun 2005 dimulai dari daerah pantai; Sarmi Mamberamo, Yapen, Manokwari, Sorong dan biasanya dengan menggunakan momentum tertentu. Di akhir 2005, gerakan bersenjata bergeser ke daerah gunung. Salah satu penandanya adalah aksi penyanderaan oleh Kelly kwalik di tahun 1998.²⁵

Menurut Apriani Anastasia Amenes S, Sos, M,si akademisi Uncen, konflik bersenjata yang terus meningkat dan menyebar inheren dengan meningkatnya PSAA akan mempersulit proses perdamaian yang

²⁴Richardany Nawipa, SH, FGD Draff Hasil Investigasi PSAA, 8 Juni 2022, Jayapura

²⁵Wawancara dengan Frits Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

sedang digagas oleh berbagai pihak.²⁶ Konflik ini telah mengorbankan nyawa terutama masyarakat sipil dari berbagai usia, profesi, jenis kelamin dan etnis(OAP dan non OAP), aparat keamanan dan juga TPNPB. Aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak dapat berjalan normal. Masyarakat sipil terutama OAP kehilangan hak-hak dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, tanah dan sumber daya alamnya karena harus mengungsi, tanpa ditangani dengan serius oleh pemerintah. Tidak ada perlindungan bagi masyarakat sipil dalam menjalankan aktifitas sehari-hari. Apalagi ketika konflik bersenjata terjadi di ruang publik atau di tengah-tengah pemukiman masyarakat sipil. Konflik yang terus menerus mereproduksi kekerasan justru memperkuat resistensi masyarakat sipil terhadap negara dan melemahkan eksistensi negara di tanah Papua serta menambah luka dan dendam para korban terutama OAP dan kini banyak juga non OAP. Siklus kekerasan ini telah mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan perdamaian di tingkat lokal, regional dan internasional.

B. PERISTIWA PSAA MERUPAKAN FENOMENA GUNUNG ES

Sejumlah wilayah telah menjadi tempat perdagangan senjata api dan amunisi di Papua yakni Nabire, Timika, Wamena, Jayapura, Biak, Serui, Merauke, Nduga, Pegunungan Bintang, Sorong dan Manokwari. Nabire menjadi tempat transaksi utama, hal ini dikarenakan permintaan senjata api dan amunisi yang tinggi di sekitar wilayah pegunungan, bertemu dengan banyaknya jaringan dan jalur yang tersedia, ditambah lagi fasilitasi pengaman di bandara dan pelabuhan yang tidak memadai. Selain harga senjata api dan amunisi yang cukup sehingga menggiurkan banyak pihak termasuk oknum anggota TNI/Polri.

Tim peneliti menyakini bahwa PSAA merupakan fenomena 'gunung es' dimana kasus-kasus yang sebenarnya telah terjadi sepanjang tahun 2011-2021 diduga kuat melebihi kasus yang dapat diungkap oleh aparat penegak hukum. Argumentasinya, pertama, pada beberapa kasus, pelaku mengakui telah berulang kali melakukan transaksi dengan melibatkan penyedia senjata api dan amunisi lebih dari satu orang. Kedua, jaringan transaksi yang ada sangat beragam mulai dari oknum TNI/POLRI hingga masyarakat sipil di banyak tempat. Ketiga, jalur

²⁶Apriani Anastasia Amenes, S.Sos, Msi, FGD Draft Hasil Investigasi PSAA, 8 Juni 2022, Jayapura

transaksi juga sangat beragam yakni darat, laut dan udara dan ada di banyak tempat. Keempat, peristiwa kontak tembak, penyerangan atau penyeragaman terhadap aparat TNI dan POLRI makin sering terjadi di banyak tempat dengan durasi waktu yang cukup lama(berulang kali), artinya senjata api dan amunisi yang beredar masih sangat banyak. Kelima, dikarenakan setiap kali proses hukum yang dilakukan hanya memroses pelaku dilapangan sementara yang penyedia utama senjata api dan pemberi dana tidak diproses. Penyedia dan sumber dana ini bisa saja terus melakukan aksinya dengan mengubah strategi misalnya membangun jaringan dan jalur baru.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka tim menduga, hanya sekitar 30% sampai dengan 50% kasus PSAA yang dapat diungkap oleh aparat penegak hukum. Artinya juga, hanya sekitar 30% sampai 50% Barang Bukti (senjata api dan amunisi) dan nilai transaksi yang terungkap.

C. JENIS SENJATA API DAN AMUNISI YANG BEREDAR DI PAPUA

Awalnya senjata api hanya dimiliki oleh TNI dan POLRI yang bertugas di Papua adapun TPNPB selalu menggunakan alat tradisional sebagai senjata tajam misalnya parang, panah dan kampak yang digunakan saat melakukan penyerangan ke markas(pos) aparat keamanan. Kemudian senjata yang paling populer adalah *moser*, *steyr* dan *dooble Loop*. Namun seiring dengan meningkatnya konflik bersenjata, berbagai senjata api telah masuk ke Papua.²⁷ Masuknya berbagai jenis senjata api seperti M16, M4, SS1 V1, GLM dan lainnya dimulai pada tahun 2015.

Adapun jenis senjata api yang beredar di Papua :

a) Senjata dari Luar Negeri.

Beberapa jenis senjata api dari luar negeri yang diketahui digunakan oleh TPNPB Papua antara lain:

- **AK-47 dan AK-74**

Senjata ini diciptakan atau dirancang oleh Mikhael Khalasnikov

²⁷Wawancara dengan Fritis Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

pada tahun 1942 dan mulai diproduksi pada tahun 1947 yang menjadi senapan standar tentara soviet tahun 1949. Biaya produksi senjata ini tergolong murah, memiliki daya tahan tinggi dengan harga yang relative murah berkisar Rp 7.000.000,00 sehingga sangat populer dan digemari di seluruh dunia. Senjata ini pun memiliki lisensi di 30 negara termasuk di Indonesia.²⁸ Dalam penggunaannya, AK-47 dikenal bandel dan mudah dirawat, selain tidak masalah jika terendam air atau masuk lumpur. Memiliki Daya serangnya juga besar dengan kaliber 7.62 mm. Akurasinya masih di bawah senapan M-16, terutama untuk target lebih dari 400 meter. Pasukan elite Indonesia seperti RPKAD, Kopasgat, Marinir, hingga Banteng Raider pernah menggunakan AK-47.²⁹ Untuk diketahui, ada berbagai varian seperti AK-74 pernah terlihat digunakan kelompok bersenjata Papua.

- **Senapan Mesin PKM Rusia**

Tribunnews menyebutkan kelompok bersenjata Papua secara langka pernah dipotret menenteng senapan mesin, salah satunya senapan mesin regu PKM buatan Rusia. Bahkan, Senapan mesin PKM mampu memberondong peluru 650 per menit. Jarak efektif tembakan rata-rata satu kilometer, tetapi mampu mencapai jangkauan 3,8 kilometer. PKM menggunakan peluru kaliber 7,62 mm. Senjata itu sudah teruji di berbagai konflik dunia dan menjadi senapan mesin andalan Blok Timur di masa lalu. Meski hingga kini belum diketahui secara pasti, dari mana KKB Papua mendapatkannya, namun diduga mereka mendapatkannya dari pemasok senjata illegal.³⁰

- **Steyr AUG**

Dalam beberapa kasus dan foto-foto yang tersebar di dunia maya, selain senjata api rakitan, Kelompok bersejata di Papua juga

²⁸<https://intisari.grid.id/read/032398030/dijual-rp50-juta-per-pucuk-dan-pelaku-dihukum-seumur-hidup-inilah-fakta-penjualan-senjata-kepada-kkb-papua-oleh-oknum-tni-dan-polri?page=all> diupload pada 25 Oktober 2020.

²⁹<https://intisari.grid.id/read/032717752/menantang-tni-berperang-kkb-papua-siapkan-5-jenis-senjata-termasuk-steyr-aug-australia?page=all> Diupload pada Senin, 31 Mei 2021.

³⁰<https://intisari.grid.id/read/032717752/menantang-tni-berperang-kkb-papua-siapkan-5-jenis-senjata-termasuk-steyr-aug-australia?page=all> Diupload pada Senin, 31 Mei 2021

memiliki Steyr AUG buatan Austria. Diduga senjata api ini dirampas dari anggota Brimob (POLRI). Namun kuat dugaan mereka membeli senjata api ini secara illegal. Seperti diketahui, berdasarkan data dari Kompas.com, senjata api jenis ini digunakan oleh kelompok Sabinus Walker saat menembak mati seorang anggota Brimob pada 2015. Senjata api ini memiliki teleskop yang dapat digunakan untuk membidik dari jarak jauh. Jarak efektif tembakan mencapai 500 meter. Bahkan, Senjata itu kerap digunakan Brimob dalam latihan tembak reaksi dan berbagai misi.³¹

AUG sudah sejak lama menjadi inventaris Gegana Brimob, selain itu Kopassus dan satuan elite lainnya juga menggunakan varian AUG, meski tidak menjadi senjata utama. Varian AUG yang digunakan di Indonesia mulai dari AUG A1, AUG A2 dan AUG A3.³²

- **M-16 America**

M-16 selain dipunyai tentara AS, US M16 dan M4A1 saat ini juga digunakan oleh 15 militer negara anggota NATO dan 80 negara non - NATO. Awalnya, M16 adalah senjata militer standar untuk tentara AS, tetapi digantikan oleh M4. Spesifikasi kedua senjata api ini saat menembak dengan laju mulai dari 700 hingga 950 putaran per menit secara cepat, dengan panjang 5,56 milimeter. Peluru yang ditembak bisa mencapai jarak 3 km. Dalam penggunaannya, senjata-senjata ini dapat digunakan untuk menembak secara semi-otomatis dan sepenuhnya otomatis. Beberapa anggota TPNPB sempat terlihat menyandang senapan M-16, dengan varian M-16A1. TNI pernah menggunakan M-16 untuk mempersenjatai batalion tempurnya, sebelum akhirnya perusahaan pertahanan Indonesia Pindad memproduksi SS1 yang merupakan lisensi dari FNC Belgia.³³ M16A1 pada masanya ikut diterjunkan dalam Operasi Seroja di Timor Timur. Saat ini M16A1 tidak lagi digunakan oleh satuan tempur TNI, namun senapan

³¹<https://intisari.grid.id/read/032717752/menantang-tni-berperang-kkb-papua-siapkan-5-jenis-senjata-termasuk-steyr-aug-australia?page=all> Diupload pada Senin, 31 Mei 2021

³²<https://www.kaskus.co.id/thread/60b4e2a31cdf657d791755d3/23-jenis-senapan-serbu-tni-dan-polri-2021/>

³³<https://intisari.grid.id/read/032717752/menantang-tni-berperang-kkb-papua-siapkan-5-jenis-senjata-termasuk-steyr-aug-australia?page=all> Diupload pada Senin, 31 Mei 2021

serbu ini masih digunakan untuk latihan. Selain itu, M16A1 juga masih digunakan oleh satuan teritorial, misalnya Kodim dan Koramil.³⁴

- **M4**

M4 Karabin M4, atau *M4 Carbine*, adalah versi pendek dan ringan dari senapan serbu M16. Senjata ini awalnya dikembangkan oleh Colt guna memenuhi kontrak untuk Uni Emirat Arab (UEA), M4 kemudian digunakan oleh Angkatan Darat dan Korps Marinir Amerika Serikat (AS). Karabin M4 memiliki 80% bagian yang sama dengan M16A2. M4 memiliki pilihan tembakan semi-otomatis dan *burst* tiga butir (sama dengan M16A2). M4 dan M4A1 menggunakan peluru kaliber 5.56 x 45 mm NATO. Keduanya adalah senapan *selective-fire*, yang menggunakan sistem gas, *air-cooled*, memakai magazenbox, dan mempunyai popor teleskopik. Popor ini bisa ditukar dengan popor biasa, tetapi itu jarang dilakukan pada militer Amerika Serikat. Seperti karabin pada umumnya, M4 lebih nyaman ditenteng daripada senapan laras panjang.³⁵

Selain ideal untuk digunakan oleh tentara non-infanteri (seperti pengemudi kendaraan, ajudan, dan perwira staf), ini juga membuat M4 cocok untuk pertempuran jarak dekat dan operasi pasukan khusus. Di Indonesia menjadi salah satu senjata andalan dari tim Densus 88 untuk melumpuhkan teroris dan juga dipakai oleh Satuan Brimob dalam pengamanan di Papua.³⁶ Kini pada sejumlah kasus transaksi senjata api di Papua, M4 sudah masuk dalam transaksi senjata api ilegal setidaknya sejak tahun 2017.

- **PISTOL GLOCK, COLT US ARMY DAN SENJATA LARAS PENDEK LAINNYA**

Glock adalah pistol semi-otomatis yang dirancang dan diproduksi perusahaan senjata Austria, Glock GmbH. Pistol Glock juga

³⁴<https://www.kaskus.co.id/thread/60b4e2a31cdf657d791755d3/23-jenis-senapan-serbu-tni-dan-polri-2021/>

³⁵<https://pabloagent008.wordpress.com/about/> Diupload pada Jumat, 11 December 2009, dan diunduh pada Rabu, 06 April 2022, Pukul: 16:49 WIT.

³⁶<https://intisari.grid.id/read/032398030/dijual-rp50-juta-per-pucuk-dan-pelaku-dihukum-seumur-hidup-inilah-fakta-penjualan-senjata-kepada-kkb-papua-oleh-oknum-tni-dan-polri?page=3>

digunakan oleh militer serta lembaga penegak hukum seluruh dunia, termasuk juga di AS. Ukurannya yang kecil, andal, cocok digunakan dalam segala kondisi dan memakai berbagai jenis amunisi, membuat Glock sangat populer. Dilansir dari situs resmi Glock, Glock 42 memiliki panjang 5,94 inci atau sekitar 15 cm, berbobot 345 gram (tanpa magasin), dan 450 gram (dengan magasin), tinggi 10 cm, panjang dan laras 8 cm. Kapasitas amunisi dalam magasin mencapai enam butir. Pistol Glock memiliki *Safe-action* ini berfungsi mencegah pistol menembak secara otomatis apabila terjatuh ke tanah.³⁷

Pistol Glock adalah senjata yang umum digunakan oleh lembaga penegak hukum dan organisasi militer di seluruh dunia. Popularitas pistol Glock dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor. Sangat handal, mampu berfungsi di bawah kondisi ekstrem dan dapat ditembakkan menggunakan berbagai jenis amunisi (9mm, 10mm, .40 S&W, .45 ACP, .45 GAP, .357 SIG, .380 ACP, konversi kit pihak ketiga yang tersedia untuk .22 LR dan .50 GI).³⁸ Pada transaksi senjata api, pistol Glock merupakan senjata api pendek yang digunakan di Papua. Selain itu sejumlah senjata api laras pendek lainnya seperti pistol Colt US Army, kini menguasai transaksi senjata api di Papua. Juga Colt M1911A1, pistol semi-otomatis pertama yang dipakai oleh angkatan bersenjata Amerika Serikat (AS). Diperkenalkan pada 1911 oleh perancang senapan asal AS, John Moses Browning, Colt 1911 menggantikan tugas pistol kaliber .38 yang dipakai sejak pada perang Filipina - AS (1899 - 1902).³⁹

b) Senjata Produksi Indonesia

- **SS1 V1 dan SS2 V2- PT. PINDAD**

Jenis SS1 V1 ini dianggap sangat berbahaya. Melansir dari laman resmi PT Pindad, SS1 V1 merupakan senapan serbu pertama yang diadopsi langsung dari FN FNC. Senapan ini memiliki berat

³⁷<https://www.inews.id/news/internasional/spesifikasi-glock-42-senjata-api-favorit-untuk-bela-diri-warga-sipil/2>

³⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Glock_GmbH.

³⁹<https://www.idntimes.com/science/discovery/alfonsus-adi-putra-alfonsus/daftar-pistol-paling-mematikan-di-dunia?page=all>

kosong 4.02 kg dan berat isi 4.38 kg. Dengan munisi 5.56 x 45 mm standar NATO dan panjang laras 449 mm, SS-1 V1 dapat menembak dengan sangat akurat sampai dengan jarak 400 meter. Mobilitas dalam penggunaan SS1 dapat semakin mudah dengan popor yang dapat dilipat.⁴⁰

Senjata api ini dipakai oleh KKB Papua dalam beberapa kesempatan dan paling sering didapatkan dari hasil rampasan di pos-pos TNI/POLRI. Misalnya saat menyerang Pos Polisi 99 Ndeotadi Paniai pada 15 Mei 2020⁴¹ atau Peristiwa Kali Brasa Yahukimo pada 18 Mei 2021.

Grenade Launcher Module (GLM) sebagai pelontar granat yang dipasangkan pada SS1. Pada peristiwa penyerangan Pos Satgas Mupe Yonif Marinir-3 di Nduga, Papua tanggal 27 Maret 2022. Senjata itu diduga diambil KKB dari Satgas Yonif 700, sedangkan amunisi GLM adalah rampasan dari Satgas Yonif 330 sebagaimana disampaikan oleh Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI AL Laksamana Pertama Julius Widjojono.⁴² Meski sebelumnya tidak ada pemberitaan terkait hilangnya GLM dan amunisi tersebut.

D. ASAL SENJATA API DAN AMUNISI DARI LUAR INDONESIA

Bahwa sejumlah senjata api diduga didapat dari perdagangan senjata api lintas negara seperti Philipina atau PNG. Sepanjang kasus yang didata oleh Tim penelitian, setidaknya ada 5 kasus yang diduga sumber senjata dan amunisi berasal dari luar Indonesia yakni dari Philipina jalur masuknya melalui Sangihe Talaud dan dari PNG, jalur masuknya langsung dari perbatasan negara yakni dari sekitar Pegunungan Bintang, Suru-Suru, Merauke, Jayapura dan Keerom. Sedangkan untuk di dalam negara, Ambon dan Poso disebut-sebut sebagai lokasi asal senjata setelah konflik di kedua tempat tersebut.

Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Inf

⁴⁰<https://intisari.grid.id/read/032717752/menantang-tni-berperang-kkb-papua-siapkan-5-jenis-senjata-termasuk-steyr-aug-australia?page=all> Diupload pada Senin, 31 Mei 2021.

⁴¹<https://nasional.tempo.co/read/1343232/polda-papua-kantongi-identitas-terduga-penyerang-pos-paniai>

⁴²<https://news.detik.com/berita/d-6003348/pelontar-granat-kkb-untuk-serang-pos-marinir-diduga-di-ambil-dari-satgas-yonif>

Muhammad Aidi menjelaskan, pasca kejadian di dua daerah itu banyak tersebar senjata dan amunisi di tangan perusuh dan belum semuanya berhasil ditarik kembali ke negara dan kemungkinan sebagian besar disusupkan masuk ke Papua.⁴³ Ada yang masuk Maluku Utara, kemudian ke Sorong Papua Barat lalu masuk ke Papua.⁴⁴ Letak Poso yang secara geografis berdekatan dengan Filipina memiliki jalur laut yang lebih terbuka. Hal senada disampaikan oleh Melpayanti Sinaga, S.IP, M.A akademisi Uncen, letak pulau Papua yang strategis memberi peluang transaksi dari luar negeri seperti PNG, Philipina atau mungkin ke jalur (negara) yang agak lebih jauh.⁴⁵

International Crisis Group (ICG) menyebutkan bahwa secara umum terdapat empat sumber utama senjata api ilegal di Indonesia: Pertama, senjata tersebut dicuri atau dibeli secara ilegal dari personil pasukan keamanan; kedua, senjata tersebut dapat berupa sisa dari penyimpanan di kawasan konflik; ketiga, diproduksi oleh produsen senjata lokal, dan; keempat, diselundupkan dari luar wilayah Indonesia.⁴⁶

Di tahun 2014, Kapolda Papua Tito Karnavian mengatakan pasokan senjata kepada kelompok-kelompok sipil di wilayah Pegunungan Tengah, tidak hanya dari hasil rampasan, namun juga melalui perdagangan ilegal dengan pihak asing. *"Kelompok sipil yang sering melakukan aksi kriminal, umumnya mendapat senjata rampasan dari aparat yang lengah, seperti di Pos Kulirik, Puncak Jaya. Selain itu, mereka juga sudah mulai memasok persenjataan dari luar negeri melalui jalur perdagangan senjata ilegal."*⁴⁷ Kepolisian sendiri terus menelisik jaringan peredaran senjata tersebut. Diduga, ada sejumlah senjata berasal dari Philipina Selatan dan Papua Nugini yang akan diseludupkan ke wilayah konflik di daerah pegunungan Papua.⁴⁸

Adapun Kepala Komando HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey

⁴³ <https://kabarpapua.co/amunisi-kksb-tak-pernah-habis-darimana-asalnya/> Diupload pada 26 Juli 2019.

⁴⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1294358/polisi-lacak-dugaan-penyelundupan-senjata-dan-amunisi-k-e-papua/full&view=ok>

⁴⁵FGD Pra Investigasi PSAA di Papua, Jayapura, 6 September 2021

⁴⁶International Crisis Group. *Illicit Arms in Indonesia*. Policy Briefing. No 109. Jakarta/Brussels, 6 September 2010.

⁴⁷ <https://regional.kompas.com/read/2014/05/23/0843297/Polda.Papua.Dalami.Penyelundupan.Senjata.dari.Filipina.Selatan> Diupload pada 23 Mei 2014.

⁴⁸Wawancara dengan Kompol Tofan Irdianto, PS Kasubdit Kamneg Direskrimum Polda Papua, Jayapura 12 April 2022

mengatakan bahwa dalam laporan yang dirilis oleh Komnas HAM Papua, sejak awal pintu masuk pembelian senjata api hanya melalui satu pintu yaitu PNG, dan ini dilakukan melalui dua jalur yakni Jayapura dan Sota (Merauke). Setelah konflik Ambon, peredaran penjualan senjata api dan amunisi dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan laut. Ditandai dengan penangkapan terhadap Yuli Murib di Sorong tahun 2014 karena melakukan transaksi pembelian senjata dari luar Papua. Sejak itu pembelian secara illegal dilakukan lewat Jayapura, Timika, Sorong, Manokwari, Nabire, Serui dan Biak melalui pelabuhan-pelabuhan laut karena semua pelabuhan laut sangat berpotensi terjadinya transaksi amunisi secara illegal.⁴⁹

a) Filipina Selatan.

Sangihe Talaud (Sulawesi Utara) adalah salah satu titik kritis penyeludupan senjata api ke Indonesia. Salah satu sumber utama adalah Philipina bagian selatan yang kemudian diselundupkan ke wilayah Sangihe Talaud di Sulawesi Utara. Jalur ini sebenarnya sudah diketahui luas oleh otoritas keamanan Philipina dan Indonesia. Ada delapan pulau di kawasan Sangihe Talaud yang menjadi titik masuk penyelundupan senjata api dari Philipina Selatan, selain Tawao - Nunukan dengan senjata bersumber dari Philipina Selatan.⁵⁰

Mantan Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menyampaikan bahwa memang ada info-info bahwa (senjata) bukan hanya dari dalam negeri, ada juga dari luar negeri. Masuknya dari Filipina melalui Maluku Utara, kemudian ke Sorong Papua Barat lalu masuk ke Papua dan wilayah pegunungan.⁵¹ Sebelumnya di tahun 2014, mantan Kapolda Papua Irjen Tito Karnavian mengatakan jaringan perdagangan senjata dari Mindanao, Philipina Selatan melalui Pulau Sangihe Talaud, Sulawesi Utara, tuduhan ini berdasarkan penangkapan terhadap seorang pria berinisial JM yang membawa

⁴⁹Wawancara dengan Frits Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

⁵⁰Astuti, P. 2011: hal 89-90. Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal Pasca Reformasi terhadap Keamanan Nasional Indonesia, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

⁵¹<https://www.merdeka.com/peristiwa/filipina-jadi-jalur-penyelundupan-senjata-api-ke-papua.html> diupload pada 13 Januari 2020, pukul 07:32.

ratusan amunisi bersama 3 pucuk senjata, jenis Armalite AR-15, Revolver dan FN di Pelabuhan Sorong.⁵² Apalagi mengingat bahwa konflik di Philipina sudah mereda maka bisa saja senjata yang ada itu didistribusikan ke luar Philipina, karena permintaan pasar internasional yang tinggi terutama ke daerah konflik seperti Papua.⁵³

b) Papua New Guinea (PNG)

Papua New Guinea berbatasan langsung dengan provinsi Papua oleh karenanya transaksi yang dilakukan merupakan transaksi lintas batas negara. Praktik ini selalu melibatkan orang-orang setempat dalam jumlah yang relative banyak.

Cross-border trafficking of firearms sometimes takes on the form of so-called "ant trafficking"; in other words, the illicit flow is facilitated by carrying or transporting very small quantities, possibly by numerous individuals. (Perdagangan senjata api lintas batas kadang-kadang berbentuk apa yang disebut "perdagangan semut"; dengan kata lain, peredaran gelap difasilitasi dengan membawa atau mengangkut dalam jumlah yang sangat kecil, mungkin oleh banyak orang).⁵⁴

Pada 21 Pebruari 2011, Kepolisian Daerah Papua menyatakan masih menyelidiki kemungkinan terjadinya perdagangan senjata api di daerah batas antara RI dan Papua New Guinea. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Bidang Humas Polda Papua Komisaris Besar Wachyono setelah ditemukannya 11 senjata api laras panjang beserta amunisinya dalam bengkel las bubut milik PT, 53 tahun, di Jalan Raya Abepura, Kamkey, Kelurahan Awiyo, Kota Jayapura. Wahyono mengatakan penemuan tidak terkait dengan keberadaan kelompok tak dikenal di Kota Jayapura yang melakukan penyerangan terhadap warga di Wilayah Tanah Hitam, Abepura awal Desember 2010. Saat itu, kelompok tersebut menyerang penduduk menggunakan senjata laras panjang yang mengakibatkan beberapa orang terluka.⁵⁵

⁵²<https://www.jeratpapua.org/2014/08/07/dugaan-perdagangan-senjata-di-papua-dari-mana-asalnya>

⁵³Elvira Runkabu, S.IP, Mst FGD Pra Investigas PSAA di Papua , Jayapura 6 September 2021

⁵⁴United Nation Office On Drugs And Crime, Global Study On FireArms Trafficking 2020, Vienna.

⁵⁵<https://nasional.tempo.co/read/314822/polisi-papua-sidik-dugaan-perdagangan-senjata-di-perbatasan> Diupload pada Senin, 21 Februari 2011 11:05 WIB (Jerry Omona), diunduh pada 20 Februari 2022, Pukul 13:00 WIT.

Sepuluh tahun kemudian, Dandim 1715/Yahukimo Letkol Inf Christian Ireeuw, mengatakan penyerangan di Suru-Suru Kabupaten Yahukimo, pada 18 November 2021 yang dilakukan oleh KKB menggunakan senjata yang dibeli sebanyak empat pucuk senjata M-16 dan sekarung amunisi dari pemasok di PNG. Dandim mendapat informasi, senjata api dan amunisi KKB itu dibeli dari hasil menjual emas hasil pendulangan, dengan merujuk pada beberapa lokasi pendulangan emas di kabupaten Yahukimo.⁵⁶ Hingga kini proses hukum dari peristiwa Suru-Suru belum terungkap lengkap.

Sebelumnya pada kasus yang melibatkan 2 anak buah dari Lamek Taplo, TPNPB Ngalum (Pegunungan Bintang) pada 7 September 2021 yakni Yulian Uropmabin dan Kapol Uropmabin dimana Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Ignatius Yoga Triyono mengungkap 5 senjata api yang diamankan dari teroris KKB Papua merupakan buatan AS. Berdasarkan pengakuan keduanya senjata berasal dari Bougainville, Papua Nugini (PNG). Dipastikan dari nomor seri senjata api buatan Amerika Serikat, bukan milik TNI-Polri.⁵⁷

Menurut akademisi Uncen, Marinus Yaung setelah referendum Bougainville (PNG) akhir November - Desember 2019, banyak senjata milik Bougainville Revolution Army (BRA) yang disita dan digudangkan. TPNPB menawarkan untuk membeli senjata-senjata dan amunisi tersebut. Gagasan ini berasal dari dua orang pentolan TPNPB yang bermukim di PNG, bukan proyek milik West Papua Army (WPA), sayap militer ULMWP. Sebenarnya WPA memiliki sumber dana dan juga ingin memiliki senjata yang disita dari pampasan perang kemerdekaannya di Bougainville namun tidak punya akses ke BRA. BRA menawarkan senjata dan amunisi dalam jumlah yang banyak. Ada sekitar 100 sampai 200 pucuk senjata dengan segala jenis. Harga senjata bervariasi sesuai jenis dan mereknya. Paling murah diharga sekitar 2 - 5 juta untuk pistol dan amunisinya.⁵⁸

Rute lain yang digunakan adalah Thailand dan Malaysia, dulu

⁵⁶<https://news.detik.com/berita/d-5820960/kkb-tewaskan-prajurit-tni-di-yahukimo-diduga-disuplai-senjata-dari-png>

⁵⁷<https://regional.kompas.com/read/2021/09/10/123000378/bukan-milik-tni-5-senjata-yang-disita-dari-kkb-ternyata-buatan-amerika-dan?page=all>

⁵⁸<https://papaunik.com/2021/09/09/dana-otsus-dan-desa-di-papua-digunakan-beli-senjata-di-bougainville/> Diupload pada 09 September 2021

digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Selain itu dapat masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan cara didomplengkan dengan barang impor, seperti tekstil dan elektronik serta diperkirakan penggabungan dilakukan ketika kapal laut pengangkut barang impor tadi transit di Singapura. Senjata laras panjang dari dua tempat penyimpanan ini dikirim ke daerah konflik di Aceh, Poso, Maluku dan Papua.⁵⁹

Masih menurut Astuti. P dalam tesisnya yang berjudul Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal Pasca Reformasi terhadap Keamanan Nasional Indonesia, pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta, bahkan impor senjata api senjata secara resmi atau legal yang membutuhkan persyaratan sangat ketat dan pengguna akhir atau *end user* dapat menjadi ilegal ketika sebagian atau semua senjata tersebut disalahgunakan oleh “orang dalam” seperti kasus senjata gelap warisan almarhum Brigjen TNI Koesmayadi, mantan Wakil Asisten Logistik Kepala Staf TNI AD (Waaslog Kasad) pada tahun 2006 dimana di tempat tinggalnya ditemukan 103 pucuk senapan, 42 pistol, 6 granat dan sekitar 30 ribu peluru dengan jenis antara lain SS-1, AK-47, MP-5 dan M-16. Penyalahgunaan terjadi disebabkan Koesmayadi memiliki kewenangan besar dalam menentukan pengadaan senjata api di lingkungan TNI AD dan menjadi bagian dari agen tunggal sebuah produk senjata. Setiap kali almarhum Koesmayadi membeli senjata maka ia selalu menyimpan sebagian senjata tersebut untuk koleksi pribadi dan tidak pernah dilaporkan.

Menurut Kompol Tofan Irdianto, S.Sos, PS Kasubdit 4 Kamneg Ditreskrim Polda Papua sebenarnya semua daerah sama. Kemungkinan karena letak wilayahnya terdapat sungai, pelabuhan-pelabuhan, sehingga mudah(transaksi), Nabire merupakan titik temu dari Puncak, Paniai, sebagai sentral mobilisasi antar kabupaten. Mobilisasi KKB sendiri terjadi dari Intan Jaya ke Tembagapura, Intan Jaya ke Paniai, dari Puncak ke Paniai, semuanya lewat Nabire. Sehingga Nabire menjadi tempat untuk mencari senjata api dan amunisi. Langkah-langkah pencegahan telah dilakukan oleh pihak Polda Papua dengan mengawasi bandara, pelabuhan, dan

⁵⁹Astuti, P. 2011: hal 87. Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal Pasca Reformasi terhadap Keamanan Nasional Indonesia, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

daerah-daerah yang sering digunakan masyarakat sipil dalam melakukan transaksi.

Adapun Guftaf Kawer, SH, Msi direktur PAHAM Papua mengatakan ada proses yang tidak benar pada setiap proses penangkapan yakni tidak diberikan penjelasan tentang kesatuan dari pasokan senjata api tersebut sehingga ketika pemberitaan oleh media massa membias ke negara lain. Tentunya terhadap kasus ini harus diuji di Puslabfor. Misalnya pada penangkapan senjata api atau amunisi yang dikatakan berasal dari luar negeri, aparat penegak hukum tentunya harus mengecek jenis senjata dan asal negara serta kesatuan(institusi) yang menggunakan. Hal ini yang ditutup. Ketika ditanya amunisi buatan pindad dari(negara) mana, lalu oknum aparat pun terdiam.⁶⁰

Oleh karenanya PSAA mesti dibuktikan kasus-per kasus karena jaringan yang dimiliki masih sangat tertutup dan bisa saja hanya 'klaim atau tuduhan sepihak' untuk menutupi keterbatasan investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun karena ada keterlibatan pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuasaan. Tuduhan itu juga bisa dipakai untuk kepentingan lain misalnya semacam '*warning*' bagi pihak luar agar menjauh dari Papua baik secara phisik maupun karena isu-isu tertentu. Pendek kata, dipakai untuk membatasi advokasi (HAM) Papua dihadapan dunia internasional.

Setidaknya ada 2 kasus yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA) yang awalnya atas tuduhan perdagangan senjata dan amunisi, namun kemudian tidak dapat dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Misalnya pada 07 Agustus tahun 2014 polisi menangkap 2 wartawan Perancis dari *Arte TV* yakni Thomas Charles Dandois, 40 tahun, dan Marie Valentine Louise Bourrat alias Valentine Bourrat, 29 tahun⁶¹ tuduhan awalnya melakukan perdagangan senjata dengan Kepala suku Lanny Jaya yakni Areki Wanimbo. Tuduhan itu diawali dengan penangkapan kedua wartawan di rumah Areki Wanimbo(Wamena). Dituduhkan keduanya akan pergi ke Lanny Jaya atas bantuan Areki Wanimbo untuk bertemu dengan pimpinan TPNPB Lanny Jaya Enden Wanimbo. Pada tahap penuntutan, tuduhan pasal terhadap kedua jurnalis tersebut diubah menjadi pelanggaran terhadap ijin sesuai

⁶⁰Wawancara dengan Gustaf Kawer SH, Msi, direktur PAHAM Papua Jayapura 2 Pebruari 2022

⁶¹<https://nasiona1.tempo.co/read/616820/2-jurnalis-prancis-di-papua-divonis-25-bulan-bui/full&view=ok> diupload pada Jumat, 24 Oktober 2014 15:37 WIB dan diunduh pada 19 November 2021 pukul 13:25WIT.

dengan pasal 122 huruf a Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, UU Imigrasi. Keduanya kemudian dituntut 4 bulan dan diputus 2 bulan 15 hari+ denda 2 juta rupiah subsidi 1 bulan penjara oleh PN Jayapura nomor perkara 310/Pid.Sus/2014/PN JPR. Sedangkan Areki Wanimbo dituduh melakukan transaksi amunisi dan makar, disidang di PN Wamena. Tuduhan ini tidak beralasan sebab Areki Wanimbo melakukan transaksi senjata atau makar dengan siapa?. Lagipula tidak ada ada satupun BB terkait PSAA. Areki dituntut 5 tahun penjara oleh JPU, majelis hakim memutus bebas. Ketika JPU melakukan Kasasi, Mahkamah Agung menguatkan putusan PN Wamena.

Kemudian penangkapan terhadap seorang turis WNA asal Polandia Warga negara Polandia Jakob Fabian Skzypski (JFS) pada Agustus 2018 dengan tuduhan awal melakukan perdagangan senjata api. Sebelum berkas JFS sampai di Kejaksaan, Kabid Humas Polda Papua telah meralat dengan mengatakan bahwa JFS terlibat dalam mengkampanyekan pelanggaran HAM di Papua di dunia internasional. Tidak ada dakwaan terkait penyalahgunaan senjata api atau amunisi (UU Nomor 12 tahun 1951) JFS justru dituduh melakukan makar. Meski polda Papua telah membantah tuduhannya terkait perdagangan senjata api namun kasus JFS masih dipakai sebagai bahan kampanye bahwa Polda telah menangkap WNA atas tuduhan perdagangan senjata. Beberapa hari setelah penangkapan terhadap JFS, Simon Magal alias Simon Carlos Magal turut ditangkap di Timika atas tuduhan yang sama. Keduanya memulai persidangan pada 17 desember 2018 atas tuduhan makar, tanpa UU darurat 12 tahun 1951. Setelah dituntut 10 tahun penjara oleh JPU, majelis Hakim memutus perkaranya dengan vonis 5 tahun penjara. JFS dan JPU melakukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jayapura, PT Menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Selanjutnya JFS dan JPU melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), perkaranya diputus menjadi 7(tujuh) tahun penjara.

E. MOTIF : EKONOMI, BISNIS DAN STRATEGI

Konflik bersenjata antara TNI dan POLRI dengan TPNPB yang terus menerus meningkat terutama pasca kasus Nduga desember 2018 menyebabkan kebutuhan senjata api dan amunisi dari kelompok TPNPB juga meningkat. TPNPB sebagai sayap militer dengan

orang-orang yang memiliki militansi yang cukup tinggi, membutuhkan senjata untuk berperang dengan siapa saja yang dianggap bagian dari NKRI, terutama TNI/POLRI , sehingga siapa saja bisa menjadi korban.⁶²

Di sisi lain bertambahnya jumlah pasukan dengan persenjataan dan amunisi ke Papua juga menjadi peluang bagi meningkatnya transaksi internal senjata api dan amunisi di Papua maupun perluasan jaringan dari luar Papua demikian penjelasan Sekretaris Dewan Adat Papua(DAP) Leonardo Imbiri dan Elvira Rumkabu akademisi Uncen.⁶³ Leonardo Imbiri menegaskan, perdagangan senjata api dan amunisi ada kaitannya dengan praktik impunitas dalam hal penggunaan sistem keamanan di ruang publik. ‘Sistem itu seolah dibobol,’ ujarnya. Misalnya sistem keamanan di bandara yang memudahkan TNI dan Polri untuk memiliki akses keluar masuk bandara sehingga dapat juga dikatakan pihak bandara mendukung praktik ini.⁶⁴ Kondisi ini merupakan peluang yang diberikan oleh negara untuk praktik PSAA secara illegal.

Motif yang mudah ‘ditangkap’ dari PSAA secara illegal yakni untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi(uang). Keuntungan dari PSAA sekitar 50% hingga 100% dengan nilai uang puluhan hingga ratusan juta rupiah. Penjual tidak perlu memproduksi senjata api atau amunisi cukup dengan memiliki jaringan penyedia selain itu makin pendek matarantai transaksi maka makin aman dan makin besar keuntungan yang diperoleh. Oleh karenanya penjual atau penyedia cenderung memutuskan matarantai yang panjang misalnya dengan mencari langsung penjual, pembeli atau mengantar sendiri barang pesannya sehingga keuntungan yang didapat makin besar.

Untuk amunisi rata-rata dijual dengan harga Rp.100.000-Rp.150.000/butir atau Rp.5 juta-7,5 juta rupiah/magasin yang berisi 50 butir. Namun pada saat tertentu, amunisi dapat dijual seharga Rp.250.000-Rp.500.00/butir, jika pembeli membutuhkan cepat. Sebagai perbandingan, di lapangan Latihan tembak Perbakin, amunisi dijual dengan harga Rp 10.000.

⁶²Wawancara dengan Fritis Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

⁶³Fadhil Alhamid, FGD Pra Investigasi PSAA di Papua, Jayapura 6 september 2021

⁶⁴Leonard Imbiri, FGD Pra Investigasi PSAA di Papua, Jayapura, 6 September 2021

Adapun senjata api, harganya juga bervariasi. Tidak ada patokan harga yang pasti.⁶⁵ Harga sejumlah senjata api berkisar :

- Senjata laras panjang M16 dihargakan Rp.90 juta dari tangan pertama, diperantara sekitar harganya Rp.170 juta tetapi pembeli dapat mengeluarkan dana Rp.300 juta-Rp.330 juta/satuan.
- Senjata laras panjang M4 dihargakan Rp 95 juta dari tangan pertama, diperantara harganya berkisar antara Rp.150 juta-Rp.180 juta tetapi pembeli dapat mengeluarkan uang Rp.200 juta- Rp.300 juta.
- Senjata laras pendek dihargakan Rp.15 juta dari tangan pertama dari perantara dihargakan Rp.30 juta tetapi pembeli dapat mengeluarkan dana hingga Rp.80 juta-Rp.100 juta.

Helmi SH seorang praktisi hukum, mempertegas bahwa PSAA ilegal tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan konvensional yang bermotif ekonomi semata karena jaringan dari PSAA sudah sangat luas hingga ke luar negeri dan melibatkan banyak pihak lintas negara. Hingga motifnya pun akan makin beragam.⁶⁶

Menurut Gustaf Kawer SH.,Msi, Direktur PAHAM, ada kepentingan ekonomi aparat keamanan dalam hal ini prajurit TNI terhadap bisnis-bisnis di wilayah-wilayah tambang di Papua yang dilakukan oleh oknum tetapi hal ini lebih kepada perilaku institusi (militer) bukan sebagai individu. Ada unsur *design* institusi. Misalnya ketika bicara mengenai Intan Jaya, maka ada (bisnis)Antam di sana atau di Banti Timika ada Freeport dan tempat lainnya.⁶⁷

Hal yang sama dikemukakan oleh Leo Imbiri, menurutnya perdagangan senjata api dan amunisi di Papua dapat dilihat dari 2 aspek yakni bisnis dan strategi. Bisnis dalam arti manfaat ekonomi yang didapat dari oknum aparat yang terlibat. Adapun strategi digunakan dalam kaitan pengelolaan sumber daya alam(SDA). Ketika wilayah-wilayah yang kaya dengan SDA selalu inheren dengan aksi kekerasan dan menjadi target utama dari perdagangan senjata dan amunisi. Mengutip studinya saat berada di negara Sierra Leon yakni ketika wilayah-wilayah yang sarat dengan SDA dipertahankan untuk terus berkonflik karena dengan hadirnya konflik akan melemahkan posisi pemerintah pusat dan daerah dalam kaitan dengan aturan dan

⁶⁵Wawancara dengan terpidana kasus PSAA, Jordan(bukan nama sebenarnya) di Nabire 14 April 2022

⁶⁶FGD Draft Hasil Investigasi PSAA di Papua, Jayapura, 8 Juni 2022

⁶⁷Wawancara dengan Gustaf Kawer SH, Msi, direktur PAHAM Papua Jayapura 2 Pebruari 2022

proses pengelolaan SDA yang pro rakyat. Apalagi faktanya di Indonesia pengelolaan pemerintahan masih bertumpu kuat pada kepolisian dan tentara(TNI) maka kerangka konflik(baca: keamanan) menjadi kerangka negara dalam kaitan dengan mendorong proses pengelolaan(eksploitasi) SDA. Jadi kerangka negara yang legal(untuk menyelesaikan konflik) tidak dipakai karena strategi keamanan yang dominan dari Polri dan TNI.

Papua menjadi wilayah strategis tertentu bagi aparat tertentu. Bagaimana hadirkan dan amankan konflik, Papua jadi semacam medan latihan. Demikian juga yang disampaikan oleh La Muctar Unu, S.Sos, Msi, sosiolog dari Universitas Cenderawasih, bahwa penjualan senjata harus dilihat juga dalam kerangka oknum tertentu sebagai ATM(Anjungan Tunai Mandiri). Negara bermain(tidak serius) dalam konflik di Papua karena ada SDA yang sangat besar, sehingga bermacam-macam cara digunakan termasuk merawat konflik di Papua.⁶⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Hamim Mustafa, S.I, M.A.P akademisi Universitas Muhamadiyah Papua(UMP) dengan mencontohkan situasi di Freeport Tembagapura, kabupaten Mimika. Wilayah yang kaya investasi, terus terjadi konflik bersenjata akibatnya masyarakat sipil tidak berani mendekat pada wilayah-wilayah tersebut maka wilayah-wilayah investasi pun makin meluas. Konflik bersenjata meminggirkan masyarakat setempat dan merebut kekayaan yang mereka miliki.

Motif lain dapat disebut sebagai motif karir dan kredit sebagaimana penjelasan Prt Paramma, MACT akademisi Universitas Sains dan Tehnologi(USTJ), karena ada insentif yang didapat dari transaksi tersebut, diduga untuk melambungkan karier khususnya pada kasus-kasus tertentu hal mana pengungkapannya menjadi prestasi dan *point* untuk karier seseorang aparat. ⁶⁹

Rendahnya kesejahteraan prajurit terutama di daerah penugasan juga menjadi salah satu alasan mudahnya transaksi senjata api dan amunisi dilakukan. Misalkan dalam sehari biaya konsumsi anggota ditaksir Rp 150.000, tetapi ada potongan hingga yang diterima hanya Rp 50.000.

⁶⁸FGD Draft Hasil Investigasi PSAA di Papua, Jayapura, 8 Juni 2022

⁶⁹FGD Draft Hasil Investigasi PSAA di Papua, Jayapura, 8 Juni 2022

Kondisi ini mendorong anggota untuk mencari peluang-peluang yang bisa membuatnya mendapatkan uang yang lebih banyak dan disaat yang bersamaan ada 'pasar senjata api dan amunisi'. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh anggota untuk melakukan penjualan senjata api dan amunisi.

Hal lainnya, pengambilalihan bisnis TNI turut berpengaruh dalam peningkatan peredaran senjata api ilegal karena banyak oknum-oknum TNI yang berbisnis senjata api untuk menambah penghasilannya. Bisnis 'abu-abu' atau bahkan ilegal/kriminal aktor keamanan diantaranya adalah kasus uang jasa keamanan perusahaan pertambangan Amerika Serikat yang berbasis di New Orleans, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. kepada Kodam Trikora, kasus illegal logging oleh perwira tinggi TNI, pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum di Papua antara tahun 2002-2004 serta kasus ditemukannya 185 pucuk senjata api berbagai jenis di kediaman Wakil Asisten Logistik KSAD, almarhum Brigjen TNI Koesmayadi.⁷⁰

Selain itu, peningkatan peredaran senjata api ilegal di Indonesia juga disebabkan oleh praktek korupsi yang berkembang dan menduduki peringkat 2,8 terkorup di dunia (2009) disamping etika dan moral militer yang rusak akibat gaji rendah yang tidak mampu mencegah korupsi serta penjualan senjata dan bahan peledak oleh oknum anggota militer.⁷¹

Ada juga motif cipta kondisi, dimana dari beberapa orang(anggota TPNPB), diberikan senjata dan diminta untuk melakukan aksi teror ditempat-tempat yang menjadi obyek vital misalnya yang sering terjadi di Tembagapura, atau aksi di Banti Timika, jelas bahwa ada sebuah skenario atau cipta kondisi yang dilakukan oleh badan intelijen.⁷² Hal ini mirip dengan dibentuknya kelompok dari masyarakat semacam milisi (dipersenjatai). Kelompok ini tidak benar-benar nampak namun gerakannya terdeteksi pada saat-saat tertentu. Misalnya di Paniai, menurut seorang narasumber, pada situasi tertentu, peluru berhamburan seperti kacang, seperti ada pohon peluru namun tidak

⁷⁰ Astuti, P. 2011: hal 59. Dampak Peningkatan Peredaran Senjata Api Ilegal Pasca Reformasi terhadap Keamanan Nasional Indonesia, *Tesis*, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Jakarta.

⁷¹ *Ibid.*

⁷²Wawancara dengan Frtis Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

diketahui pihak yang menggunakannya dan sumber peluru tersebut, kondisi ini sangat meresahkan masyarakat.⁷³

F. BANYAK UANG ARTINYA BANYAK SENJATA

Pertanyaan yang paling sering muncul adalah darimana uang untuk membeli senjata api dan amunisi? mengingat harganya cukup mahal. Sejumlah narasumber mengaitkan dana pembelian senjata api dan amunisi dengan dana desa, dana Otsus, bantuan dari pihak-pihak tertentu atau ada kaitan dengan peristiwa tertentu, misalnya pertarungan pilkada dimana salah satu kontestan diduga terlibat *money politic* dengan kelompok bersenjata untuk 'mendukung' proses pencalonannya, tidak secara langsung uang yang diberikan untuk membeli senjata namun kemudian uang tersebut digunakan untuk PSAA.⁷⁴

Bahkan pada beberapa wilayah, kepala daerah sempat disorot atas tuduhan sebagai 'bermuka dua' atau setidaknya memiliki *link* khusus dengan TPNPB atau tokoh tertentu termasuk memberikan dukungan dana. Misalnya saat penangkapan Ratus Murib alias Neson Murib 15 Juni 2021 di Bandara Mulia Kabupaten Puncak salah satu yang disorot adalah Barang Bukti(BB) dalam bentuk buku catatan, didalamnya ditulis bahwa Pemerintah Daerah Puncak memberikan Rp.600 juta kepada kelompok Lekagak Telenggen.⁷⁵ Namun pada proses selanjutnya, BB tersebut tidak ditelusuri lebih lanjut atau diungkap secara transparan mengenai fakta yang sebenarnya.

Masih di kasus Ratus Murib alias Neson Murib, ada juga BB dalam bentuk uang sebanyak Rp.370 juta, Ratus Murib menerangkan bahwa uang tersebut berasal dari Sonny Wanimbo ketua DPRD Tolikara, namun dibantah oleh Sonny Wanimbo dan mengatakan bahwa dirinya tidak mengenai Ratus Murib atau Neson Murib.⁷⁶ Kemudian proses hukumnya hanya berfokus pada Ratus Murib. Pada kasus ini, penyidik mengatakan selama transaksi senjata api, total yang dikirim dan

⁷³Wawancara dengan 'Jeremias',(bukan nama sebenarnya) Tokoh masyarakat Mee, Jayapura November 2021

⁷⁴Wawancara dengan Irone(bukan nama sebenarnya) terpidana PSAA di Wamena, November 2021

⁷⁵<https://nasional.tempo.co/read/1473627/polisi-telisik-oknum-di-pemda-papua-yang-transfer-duit-senjata-api-ke-kkb/full&view=ok>

⁷⁶<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/413028/ketua-dprd-tolikara-bantah-danai-kkb-untuk-beli-senjata>

diterima Nelson mencapai Rp1,39 miliar.⁷⁷

Pada 28 Agustus 2021 kepala Distrik (Camat) Wusama, Yahukimo, bernama Etius Baye, 38 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian. Kabid Humas Polda Papua Kombes Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, Etius selama ini menjadi sosok yang mendanai aktivitas KKB. Bahkan, dia juga menampung sejumlah anggota KKB.⁷⁸ Kemudian TPNPB-OPM Kodap III Ndugama, Egianus Kogeya menyebutkan bahwa Kepala Distrik Wusama Etius Baye tidak terlibat dalam kelompoknya. Maka pada 1 Oktober 2021, Etius Baye dibebaskan dari Mapolres Yahukimo dengan alasan tidak cukup bukti.

Besarnya uang dikeluarkan untuk pembelian senjata api, terkuak juga pada kasus 7 September 2021 di Batom Kabupaten Pegunungan Bintang disebutkan bahwa uang pembelian senjata sebesar Rp.850 juta rupiah atau pada kasus transaksi senjata api di Nabire yang melibatkan oknum Brimob Kelapa Dua yang bertugas di BNPT yakni Muhamad Jabir Hayan(MJH) dan terdakwa lainnya dimana dari total transaksi ada sekitar 1,3 milyar rupiah.

Untuk kasus ini, sebagaimana diungkap oleh aparat penegak hukum dan putusan di pengadilan bahwa MJH dkk telah melakukan transaksi setidaknya sebanyak 14 senjata api jenis M16 dan M4. Hal mana setiap senjata api dihargakan oleh pembeli utama sekitar Rp.300 juta-Rp.330 juta maka menurut tim peneliti total nilai transaksi adalah Rp.300 juta-Rp 330 juta dikali 14 pucuk= Rp.4,2 milyar rupiah sampai dengan 4,6 milyar rupiah.

Sebenarnya komunikasi antara pimpinan daerah dengan TPNPB bukanlah hal yang baru, kadang merupakan bagian dari strategi *soft approach* untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan.⁷⁹ Bahkan di wilayah tertentu, seorang kepala daerah dapat mengidentifikasi (kelompok) pelaku TPNPB dari satu peristiwa, apakah pelakunya merupakan murni TPNPB ataukah kelompok yang mencari jatidiri dan eksistensi dengan motivasi yang tidak jelas.⁸⁰ Selain itu, komunikasi

⁷⁷<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210615141034-12-654551/pemasok-senjata-ke-kkb-papua-a-ditangkap-raup-untung-rp139-m>

⁷⁸<https://www.jpnn.com/news/diduga-danai-aktivitas-teroris-kkb-kepala-distrik-di-yahukimo-dibekuk-polis>

⁷⁹<https://papua.antaranews.com/berita/675565/kapolda-papua-minta-bupati-puncak-aktif-berkomunikasi-dengan-kkb>

⁸⁰<https://jubi.co.id/bupati-kelompok-sabinus-waker-tidak-terlibat-konflik-di-intan-jaya/>

yang dibangun justru untuk menjaga agar pembangunan di tempatnya dapat berjalan baik, jadi selain alokasi dana keamanan untuk TNI dan POLRI, pimpinan daerah juga mengalokasinya dana untuk TPNPB.⁸¹

Hal ini diperkuat oleh pernyataan dari Kepala KOMNAS HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, bahwa pembelian senjata di Papua tergolong mudah dan lancar karena ada uang yang mengalir begitu besar dan lancar di tangan masyarakat. Pengawasan terhadap Perputaran uang di setiap kabupaten di Papua yang longgar inilah yang menjadi peluang terjadinya transaksi senjata api dan amunisi begitu marak dan terus meningkat. Selain itu hadirnya kampung-kampung fiktif di wilayah Papua dengan sejumlah besar dana bagi kampung-kampung inilah yang kemudian membuka peluang uang yang besar digunakan untuk membeli senjata api dan amunisi. Pendek kata, dimulai saat ada Otsus di Papua ditambah pembagian dana kampung(dana Desa) dari pusat. Misalnya menurut pemantauan Komnas HAM, jumlah penduduk 1 Kampung tidak sampai 20 KK. Anggaran dana kampung milyaran, ini menjadi potensi besar. Dalam kasus Yongsu(kabupaten Jayapura) misalnya, TPNPB minta jatah(dana kampung), besar kemungkinan bahwa daerah lain pun demikian dan konflik makin masif. Selain itu juga ada sejumlah senjata api dan amunisi yang diambil pada saat jatuhnya pesawat atau helikopter militer, sehingga senjata itu kemudian diambil dan digunakan untuk menyerang anggota.⁸²

Penggunaan dana Otsus dalam pembelian senjata api dan amunisi tidak begitu banyak ditemukan, karena pengawasannya lebih ketat dan dikelola oleh pemerintah setingkat kabupaten sehingga lebih aman dalam menghindari transaksi ini berjalan mulus. Hal yang paling dikhawatirkan adalah ketika ada penyaluran dana desa, sebagaimana ruang lingkup penggunaannya serta pengawasan di tingkat desa lebih menjanjikan terjadinya penyalahgunaan dana desa untuk pembelian senjata api.⁸³

Frits menambahkan *“Begitu ada Dana Desa dari Jakarta masuk, peluru dan senjata pasar terbaik di Indonesia ada di Papua hari ini”*. Dalam kasus

⁸¹Wawancara dengan Irone(bukan nama sebenarnya), narapidana PSAA di Wamena, November 2021

⁸²Wawancara dengan Frits Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

⁸³<https://nasional.sindonews.com/read/116304/14/egianus-klaim-beli-senjata-dari-tni-polri-ini-kata-k-apedam-cenderawasih-1595945222>

*penggerebekan di Timika, itu uang yang dipakai dari mana? Itu dana desa, karena saya ketemu orangnya. Begitu ada dana Otsus, itu bisnis senjata tidak terlalu banyak. Tapi begitu ada dana desa, senjata dan peluru laku”.*⁸⁴

Jelasnya, memang ada dana-dan bantuan yang biasa diambil oleh TPNPB dari tangan pemerintah daerah, misalnya dana-dana Kampung. Mudahnya dana kampung diambil(digunakan) karena soal keamanan dan keselamatan kepala kampung yang diancam dan diintimidasi sehingga tak berdaya. Selain itu juga kepala kampung masih ingin mempertahankan jabatan sebagai kepala Kampung.⁸⁵

Leo Imbiri, Sekteraris DAP mengatakan keterlibatan kepala kampung dalam hal penggunaan dana desa sangat mungkin dan dengan berbagai motif, dapat memberikan dana untuk membeli senjata api atau amunisi. Misalnya, ada anggota TPNPB yang menjadi kepala desa atau kepala desa yang memiliki relasi kuat dengan TPNPB.

Menurut Kapolres Intan Jaya AKBP I Wayan G Antara, dari penyelidikan di kepolisian, ditemukan informasi salah satu sumber dana yang digunakan KKB untuk melakukan pembelian senjata api dan amunisi tersebut ternyata berasal dari rampasan anggaran dana desa. Para kepala desa yang mendapatkan dana desa dari pemerintah terpaksa menyerahkan sebagian alokasi dana desanya kepada KKB karena mendapat ancaman keamanan. Meski sudah mengetahui informasi tersebut aparat keamanan sendiri sejauh ini masih kesulitan untuk melakukan pengawalan terhadap kepala desa yang telah mencairkan anggaran itu karena medan tempuh untuk melakukan pengawalan tidak mudah serta jauh.⁸⁶ Hal ini dipertegas dengan pernyataan Kapolda Papua yakni salah satu penyebab KKB bisa membeli senjata yakni dengan memeras kepala desa yang sudah mendapatkan dana desa.⁸⁷

Menurut kapolda Papua, selama ini diduga kelompok bersenjata meminta dana kepada kepala kampung. Kapolda menegaskan bahwa

⁸⁴https://kbr.id/nusantara/03-2021/dana_desa_di_papua_dicurigai_untuk_pembelian_senjata_ilegal/104911.html Diupload pada 22 Maret 2021, pukul 16:31 WIT.

⁸⁵Wawancara dengan Fritis Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

⁸⁶<https://regional.kompas.com/read/2021/02/09/17003511/soal-anggaran-dana-desa-untuk-beli-senjata-kkb-ini-penjelasan-kapolres-intan> Diupload pada 09 Februari 2021

⁸⁷<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/359169/polda-papua-ungkap-dana-otsus-dirampas-kkb-untuk-beli-senjata>

apabila ada kepala kampung yang terbukti memberikan bantuan dana kepada KKB, maka akan ditindak tegas.⁸⁸ Diduga sempat beredar surat dari KKB yang ditujukan kepada para kepala kampung untuk meminta dukungan pendanaan. Sebelumnya kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung provinsi Papua berharap indikasi penggunaan dana desa yang disebut oleh pihak kepolisian untuk membantu KKB, mesti diusut.⁸⁹

Para pimpinan daerah memberikan respon terkait dugaan pembelian senjata dan amunisi yang menggunakan dana desa. Misalnya pada Pebruari 2020 Bupati Mimika mengingatkan agar aparat kampung tidak menyalahgunakan dana desa untuk membeli amunisi guna mendukung KKSBB.⁹⁰

Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni mengaku selama ini ada beberapa kepala desa yang telah melaporkan terkait perampasan dana desa oleh KKB. *"Ada beberapa kepala desa mengakui kalau mereka diminta memberikan dana desa dan terpaksa memberikan daripada mereka ditembak,"* kata Natalis.⁹¹

Natalis Tabuni menyebut mudahnya mendapatkan senjata di Intan Jaya, Provinsi Papua menjadi salah satu persoalan memicu gangguan keamanan. Ketersediaan senjata ini menyebabkan KKB mudah mendapatkannya, ditambah lagi adanya uang untuk membeli senjata melalui jaringan penjualan senjata. Natalis Tabuni juga mengungkapkan salah satu penyebab kegagalan Otsus karena dana desa dirampok oleh KKB untuk membeli senjata dan amunisi.⁹² Pernyataan ini sempat direspon oleh anggota DPRD Intan Jaya Martinus Maisini yang menyoroti sikap pemerintah daerah yang menurutnya tidak pernah mengontrol dana desa dan berharap DPRD dapat dilibatkan.⁹³

⁸⁸<https://wartakota.tribunnews.com/2019/11/25/terungkap-dugaan-sumber-dana-kkb-papua-untuk-beli-senjata-dan-amunisi-pelakunya-akan-ditindak-tegas?page=all>

⁸⁹<https://www.papua.go.id/view-detail-berita-7051/bpmk-harap-dugaan-penggunaan-dana-desa-bantu-kkb-diusut.html>

⁹⁰<https://www.alinea.id/nasional/bupati-mimika-ingatkan-dana-desa-untuk-beli-peluru-b1ZIo9rOQ>

⁹¹<https://regional.kompas.com/read/2021/02/09/17003511/soal-anggaran-dana-desa-untuk-beli-senjata-kkb-ini-penjelasan-kapolres-intan> Diupload pada 09 Februari 2021

⁹²<https://www.merdeka.com/peristiwa/bupati-intan-jaya-ungkap-kkb-paksa-minta-dana-desa-untuk-beli-senjata-dan-amunisi.html>

⁹³https://papua.relasipublik.com/_trashed-2/

Dana desa yang dipakai pihak KKB membeli senjata dan amunisi itu, diambil dengan cara mengancam kepala desa dan sekretaris saat mengetahui dana tersebut sudah dikirim ke rekening dan dicairkan. Terkait penyaluran dana desa ini, dirinya selaku pemerintah daerah tak bisa mengontrol, mengingat dana tersebut ditransfer langsung ke rekening para kepala Kampung maupun sekretaris kampung. "*KKB ini biasanya setelah mengetahui pencairan dana desa, akan menunggu di perkampungan. Ketika bertemu aparat desa, mereka akan meminta sebagian dana tersebut. KKB ini mengancam dengan senjata kalau tidak diberikan sebagian dana itu,*" urainya. Bupati Natalis menambahkan bahwa menjadi tugas bersama pemerintah dan pihak keamanan serta semua pihak terkait dalam pengawasan dana desa dan penjualan senjata sebab menurutnya, meski ada dana namun tak ada senjata yang dijual, tentu saat KKB kehabisan amunisi, senjata mereka tak bisa lagi digunakan dan jadi besi tua. Demikian sebaliknya. "*Keduanya saling terkait. Dana desa dan penjualan senjata ini. Kita awasi dana desa tapi juga jangan lagi ada celah untuk penjualan senjata dan amunisi. Saya apresiasi pihak keamanan yang sudah berhasil ungkap sindikat penjualan senjata di Intan Jaya.*"⁹⁴

Pihak Polda Papua, menegaskan sumber dana pembelian senjata berasal dari dana kampung terutama(transaksi) di kota Nabire. Kedua, adanya iuran-iuran dari anggota KKB atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. Ada juga permintaan-permintaan dari KKB kepada pemerintah daerah dimana KKB berada. Langkah-langkah yang sudah dilakukan yakni kerja sama dengan pemda, terkait penggunaan anggaran harus sesuai alokasi yang sudah ada di Pemda, untuk mencegah agar tidak sampai ke KKB. Terkait dengan dana kampung sudah ada upaya pengawasan, kepala-kepala kampung, ada yang terindikasi simpatisan KKB.⁹⁵ Biasanya bentuk dari permintaan dana dengan membuat surat dan meminta bantuan ke Pemda. Praktik ini sudah termonitor oleh aparat kepolisian dan dapat melakukan antisipasi agar dana tidak sampai ke KKB terutama di Kabupaten Puncak. Biasanya aparat mendapatkan informasi terkait keterlibatan kepala kampung yang berupa simpatisan, hubungan kekeluargaan, ataupun ada penekanan dari KKB kepada kepala kampung terkait dana desa. Karena adanya penekanan itu, para kepala kampung merasa terancam. Kepolisian sudah melakukan koordinasi

⁹⁴<https://mediaindonesia.com/nusantara/358466/kkb-rampok-dana-desa-untuk-beli-senjata-dan-amunisi> Diupload pada 05 November 2020,Pukul 08:35.

⁹⁵Wawancara dengan Kompol Tofan Irdianto,S,Sos, PS Kasubdit Kamneg Dirreskrimun Polda Papua, 12 April 2022

dengan Pemda, untuk melakukan pengawasan. Apabila ada oknum-oknum atau aparat yang terlibat dengan KKB, otomatis kebijakan Pemda untuk mengganti atau mengambil tindakan.

Pihak kepolisian mengatakan sudah melakukan pengawasan. Adapun terkait permintaan bantuan ke pemda, pemda perlu selektif mungkin. Kedua perlu juga pengawasan dana kampung oleh pihak pemda karena hal tersebut merupakan kewenangan pemda. Ketiga terkait ikatan emosional, pihak kepolisian melakukan pengembangan, sejauh mana uang itu digunakan. Pengawasan di bandara dan pelabuhan, tetap dilakukan. Pihak kepolisian juga berharap bagi masyarakat yang mengetahui adanya penjualan senjata secara ilegal dapat berperan aktif untuk memberitahu kepada anggota kepolisian.⁹⁶

Menurut Akademisi Uncen Marinus Yaung, untuk membeli senjata dan amunisi dari Bougainville Revolution Army(BRA) uangnya bersumber dari Dana Otsus Papua dan Dana Desa Pemerintah Pusat. Terdapat laporan bahwa elit politik, pejabat daerah dan kepala-kepala kampung di wilayah tengah Papua, banyak yang terpaksa (atau dipaksa) dan secara sadar ikut terlibat menyeteror dana otsus dan dana desa/kampung ke dua orang pentolan TPN PB di PNG. Bahkan pada akhir bulan Maret 2021 yang lalu, ada seseorang yang membawa uang milyaran rupiah dalam karung dan noken menyeberang ke PNG melalui jalan tikus Kampung Mosso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Menurut Marinus Yaung, uang milyaran belum digunakan namun sedang diincar untuk dirampok oleh pantolan TPNPB yang bermukim di PNG.⁹⁷

Posisi kepala kampung sangat dilematis karena semua orang di kampung mengetahui kalau dana Desa langsung berada di bawah kekuasaan kepala kampung, jika tidak dibagi(diberikan) maka dirinya akan terancam. Selain itu ada juga yang memiliki hubungan kekerabatan dengan anggota TPNPB. Sehingga mereka juga mendapat jatah saat dibagi oleh kepala kampung. "Kepala kampung melihatnya

⁹⁶Wawancara dengan Kompol Tofan Irdianto, S,Sos, PS Kasubdit Kamneg Dirreskrimum Polda Papua, 12 April 2022

⁹⁷<https://papuaunik.com/2021/09/09/dana-otsus-dan-desa-di-papua-digunakan-beli-senjata-di-bougainville/> Diupload pada 09 September 2021

sebagai warga kampung".⁹⁸ Bisa jadi ada kepala desa yang merupakan anggota atau berelasi kuat dengan TPNPB.⁹⁹

Pada Putusan No.59/Pid.Sus/2021/PN Nab, dimana terdiri dari 5 orang terdakwa, salah satu terdakwanya yakni Terdakwa II atas nama Rupinus Nabelau di Penyidikan mengakui bahwa yang memesan senjata api adalah DW berstatus sebagai DPO yang merupakan Bendahara Kampung di Kabupaten Intan Jaya dan yang menyuruh Demianus Wantagau yang memesan senjata api adalah Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kabupaten Intan Jaya.¹⁰⁰

Selain dana desa ada juga dugaan sumber dana berasal dari tambang Emas. Letkol Inf Christian Ireuw, Dandim 1715 Yahukimo mengatakan, berdasarkan data intelijen ketika Tendius Gwijangge membeli empat pucuk senjata jenis M-16 dan satu karung berisi amunisi dari pemasok di Papua Nugini dengan menggunakan emas dari pertambangan tradisional di Distrik Seredala. Tendius memiliki sekitar 100 personel dan 20 pucuk senjata.¹⁰¹ Melalui hasil tambang, Tendius kemudian melakukan pembelian senjata yang jaringannya terdapat di PNG. Hal inilah yang kemudian memperkuat dugaan bahwa dengan kepemilikan tambang emas yang meraup keuntungan sangat besar, kemudian dipakai untuk membeli senjata.

Hal yang sama dikatakan oleh Kapolda Papua Irjen Mathius D Fakhiri, penambangan emas ilegal menjadi sumber dana KKB. Tambang tradisional ilegal itu terdapat di beberapa daerah di Papua seperti Paniai, Intan Jaya, dan sebagian Yahukimo. Menurutnya kalau Timika sudah jelas, sehingga pihaknya menggeser pendulang agar tidak mendulang lagi. Hasil penambangan yang disebut cukup besar digunakan KKB untuk membeli senjata api dan amunisi. Tempat pendulangan (emas) berkontribusi besar untuk pembelian senjata api dan amunisi. Hal ini dilakukan oleh KKB dengan 2 cara yakni menerima upeti dari pendulangan atau ikut mendulang. Terungkapnya hal ini mematahkan dugaan bahwa sumber dana KKB diperoleh dari oknum pejabat pemerintah hingga perampasan dana desa.¹⁰² Jauhnya

⁹⁸Wawancara dengan Irone(bukan nama sebenarnya) terpidana PSAA, Wamena, November 2021

⁹⁹FGD Draft Hasil Investigasi PSAA di Papua, Jayapura, 8 Juni 2022

¹⁰⁰ Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2021/PN Nab hal 16

¹⁰¹<https://palembang.tribunnews.com/2021/11/22/terungkap-sumber-kekayaan-kkb-kelompok-tendi-us-gwijangge-punya-tambang-emas-dibarter-senjata?page=all> diupload pada 22 November 2021.

¹⁰²<https://regional.kompas.com/read/2021/04/10/110000678/tambang-emas-ilegal-jadi-sumber-dana-kkb-kapolda-papua-wilayahnya-jauh-dari?page=all>

lokasi penambangan ilegal membuat pengawasan dari aparat keamanan sangat minim sehingga hal tersebut dimanfaatkan KKB untuk memperoleh dana. Dirinya meyakini dari wilayah pendulangan ilegal, KKB bisa memperoleh dana cukup besar.¹⁰³

Selain itu ada dugaan, sumber dana berasal dari pesta Pilkada meski tidak langsung diberikan untuk membeli senjata. Ada oknum tertentu yang membutuhkan pengkondisian agar suatu tempat menjadi rawan atau sebaliknya, aman atau berada dalam kekuasaan pihak tertentu. Di tempat seperti itu, kelompok TPNPB dimanfaatkan dengan diberikan dana agar berpihak pada pihak tertentu. Bayaran yang cukup besar tersebut kemudian dijadikan modal untuk membeli senjata dan amunisi. Kadang hubungan saling kenal (diantara mereka) sudah ada sebelumnya karena sama-sama di satu wilayah atau masih ada keluarga.¹⁰⁴

Biasanya KKB berupaya mencari senjata api dari kenalannya dengan menjanjikan bayaran yang besar bagi pihak yang melakukan transaksi sehingga pihak-pihak ini tergiur. Adapun dana yang didapat dari kepala kampung karena penekanan atau karena ikatan emosional, dikatakan bahwa pihak kepolisian sudah melakukan pengawasan. Adapun terkait permintaan bantuan ke pemda, pemda perlu selektif mungkin. Kedua perlu juga pengawasan dana kampung oleh pihak pemda karena hal tersebut merupakan kewenangan pemda. Ketiga terkait ikatan emosional, pihak kepolisian melakukan pengembangan, sejauh mana uang itu digunakan. Pengawasan di bandara dan pelabuhan, tetap dilakukan. Pihak kepolisian juga berharap bagi masyarakat yang mengetahui adanya penjualan senpi secara ilegal dapat berperan aktif untuk memberitahu kepada anggota kepolisian.¹⁰⁵

Menurutnya aparat kepolisian telah melakukan upaya-upaya atau pencegahan-pencegahan, terutama melakukan pengawasan terhadap pelabuhan atau bandara untuk mengantisipasi adanya penyeludupan senpi maupun amunisi. Kemudian melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap daerah-daerah yang selalu menggunakan

¹⁰³ <https://regional.kompas.com/read/2021/04/09/162814178/terbongkar-ternyata-ini-sumber-dana-kb-untuk-membeli-senjata-api-dan?page=all>

¹⁰⁴ Wawancara Irone (bukan nama sebenarnya) terpidana PSAA, di Wamena, November 2021

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kompol Tofan Irdianto, S.SoS, PS Kasubdit Kamneg Dirreskrimun Polda Papua, Jayapura 12 April 2022

kapal-kapal kayu yang melakukan bongkar muat barang, terutama di Timika dan Nabire.¹⁰⁶

Pengurus DAP, Fadhal Alhamid menegaskan sumber dana untuk pembelian senjata api dapat diselidiki secara tersendiri sebab banyak peluang yang bisa dijadikan sumber pendanaan, misalnya apakah dari dana desa, dari pendulangan atau tambang emas atau bisa jadi dari bisnis kayu atau gaharu. Sumber dana dapat juga diselidiki melalui oknum anggota parlemen atau instansi tertentu (pemerintahan sipil di tingkat kabupaten, distrik atau desa dan kampung) yang identitasnya disebut pada saat proses hukum dilakukan, mulai dari pemeriksaan di kepolisian ataupun saat persidangan. Tentu saja untuk sampai pada keterlibatan para pemberi dana tersebut diperlukan investigasi tersendiri dan komitmen dari aparat penegak hukum secara profesional tanpa menuduh ataupun melindungi pihak-pihak tertentu.¹⁰⁷

Ironisnya hampir disetiap kasus, menunjukkan pola yang sama yakni terkait pemberi dana atau sumber dana tidak mampu diungkap dengan tuntas oleh aparat penegak hukum, mulai diproses penyelidikan di kepolisian, soal sumber dana sudah jadi polemik. Hingga saat pemeriksaan di persidangan, tidak sampai pada pengungkapan siapa saja pihak-pihak yang memberikan dana untuk membeli senjata atau amunisi. Meski demikian kuat dugaan bahwa sumber pembelian berasal dari dana yang dikucurkan oleh pemerintah Indonesia.

Ada dua kelemahan utama yakni pengawasan dan pemeriksaan dana desa. Pengawasan yang paling buruk adalah pengawasan terhadap dana desa yang mengalir dan dikelola langsung oleh kepala kampung, yang bila dilihat kepala-kepala Kampung di Papua memiliki keterbatasan kapasitas dalam mengelola dan mengatur pemanfaatan dana yang ada, seharusnya dipakai untuk membangun kesejahteraan manusia Papua. Pengawasan dana desa yang paling buruk terjadi di seluruh Papua. Di tahun 2011, KOMNAS HAM Perwakilan Papua pernah memasukkan laporan dua Lurah yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran dan diproses, di kota-kota saja yang administrasinya lengkap dan teratur masih terjadi demikian, bagaimana yang ada di kampung-kampung yang jauh?. Memang ada mekanisme perencanaan tetapi mekanisme pengawasan dan pelaporan

¹⁰⁶Wawancara dengan Kompol Tofan Irdianto, S.SoS, PS Kasubdit Kamneg Dirreskrimun Polda Papua, Jayapura 12 April 2022

¹⁰⁷ Fadhal Al Hamid pada Diskusi Pra Penelitian PSAA, Jayapura 6 september 2021

sangat buruk. Peran BPK, BPKP, dan BPKD tidak nampak dalam proses tersebut.

Selain itu juga terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, banyak temuan(kasus) dari kabupaten-kabupaten di Papua tetapi dalam pelaporan tiba-tiba temuan itu menjadi WTP(Wajar Tanpa Pengecualian). Contoh di Nduga ada video yang beredar menampilkan protes dari masyarakat dan juga pegawai(ASN) yang menyampaikan bahwa pemerintahan Kabupaten Nduga tidak berjalan meski dana-dana tetap mengalir adapun dalam laporan BPK tidak ada temuan. Maka penting sekali agar BPK juga diperiksa terkait dengan tugasnya. Semua ini tidak beres dan hal ini pula yang menunjukkan bahwa banyak dana yang dikucurkan tetapi tidak dirasakan oleh masyarakat, ada masyarakat terus menjadi korban dan berteriak dalam diam. Berbeda dengan kampung-kampung di daerah konflik tentunya ada ancaman dan intimidasi dari kelompok bersenjata yang datang membawa senjata lalu menodong kepala kampung, sehingga alasan keselamatan kepala kampung dan masyarakat kampung dana itu pun diserahkan kepada kelompok bersenjata. Kesalahan terbesar BPK adalah mengaminkan kecurangan yang terjadi di Kabupaten-kabupaten dengan status WTP. Dari sini dapat disimpulkan bahwa BPK turut menjadi bagian yang membantu maraknya dan mudahnya transaksi senjata api dan amunisi di Papua atau turut berkontribusi dalam membantu suburnya pembelian senjata api dan amunisi di Papua. Oleh karena itu pemerintah perlu membenahi segala bentuk administrasi dan perlu ada ketegasan untuk menghentikan segala hal yang tidak beres yang terjadi di kampung-kampung.

III. JARINGAN, JALUR DAN KETERLIBATAN APARAT KEAMANAN PADA PERDAGANGAN SENJATA API DAN AMUNISI

A. JARINGAN DAN JALUR

Frits Ramandey kepala Perwakilan KOMNAS HAM Papua menyatakan pasar atau bisnis senjata api dan amunisi ilegal yang menjanjikan di Papua, menjadi salah satu masalah menggelisahkan karena ada berbagai kalangan yang diduga terlibat dalam bisnis senjata api dan amunisi ilegal di Papua, dengan peran masing masing, mulai dari oknum aparat keamanan, aparatur sipil negara, mantan pejabat

publik hingga warga sipil dan kelompok bersenjata.

Adapun 4 jenis jaringan PSAA di Papua :

(1). *Jaringan diantara oknum TNI/POLRI dengan masyarakat sipil,*

Pada jaringan ini, penyedia senjata api dan amunisinya berasal dari oknum TNI/POLRI, adapun perantara terdiri dari oknum TNI, POLRI dan masyarakat sipil.

Pada sebagian besar kasus yang ditemui di Papua dalam kurun waktu 2011 sampai dengan 2021, sejumlah oknum aparat memegang peranan penting pada PSAA. Termasuk ketika ada aparat yang disersi dari satuan justru sedang terlibat melakukan PSAA. Misalnya seorang anggota babinsa Kodim Paniai atas nama FAS, dirinya dalam waktu yang sama disidangkan juga atas tindak pidana disersi oleh Pengadilan Militer III-9 di Jayapura.¹⁰⁸

Demikian juga dengan seorang oknum anggota Brimob Kelapa Dua Depok bekerja di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yakni Muhammad Jabir Hayan, SH(MJH) terbukti terlibat transaksi senjata api jenis M16 dan M4. Rangkaian peristiwa PSAA sejak tahun 2017-2020, aparat kepolisian mencatat nilai transaksi sekitar 1,3 M. Kasus ini melibatkan banyak pihak, mulai dari oknum anggota TNI AD, oknum anggota Paskhas TNI AU Lanud Sulaiman Bandung, oknum anggota Brimob BNPT, mantan anggota TNI AD, oknum pendeta, oknum anggota DPRD hingga masyarakat biasa. Demikian juga kasus transaksi amunisi di Mimika yang melibatkan beberapa oknum TNI AD.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh oleh salah seorang terpidana, Irone(bukan nama sebenarnya) kasus amunisi yang disidang di PN Wamena tahun 2018. Menurutnya, dirinya membeli amunisi dari seorang oknum aparat(polisi) di Sentani Jayapura untuk dibawa ke Wamena. Awalnya cukup membayar harga amunisi dan kemudian menunggu amunisi dibawa oleh oknum polisi ke Wamena. *"kalau aparat yang bawa, tidak akan ditangkap di bandara,"* jelasnya. Setelah barang pesannya tiba di Wamena, pihak yang membeli akan menambah sejumlah uang sebagai pengganti

¹⁰⁸Putusan Nomor 100-K/PM.III-19/AD/VI/2019

biaya tiket pesawat.

(2). *Jaringan diantara masyarakat sipil,*

Jaringan ini dikelola oleh masyarakat sipil dengan membeli senjata senjata dari luar Indonesia, senjata berasal dari bekas wilayah-wilayah konflik di seperti di Philipina. Salah satu kasus yang menonjol adalah 14 pucuk pistol dan amunisi yang didatangkan dari Philipina melalui Sangihe Talaud. Jaringan ini 'terpelihara' cukup baik sehingga pada tahap awal seorang perantara di Papua menelpon perantara yang berada di Papua (Nabire), datang untuk melakukan pembicaraan awal dan mengambil langsung senjata yang dibutuhkan ke Sangihe Talaud. Adapun pihak yang menjual di Sangihe membeli senjata dari Filipina.¹⁰⁹

(3). *Jaringan langsung diantara TPNPB dan pendukungnya*

Kasus ini menggambarkan pembelian senjata yang langsung dilakukan oleh TPNPB ke PNG dengan menggunakan jaringan TPNPB di PNG. Hal ini nampak pada kasus anak buah dari Lamek Taplo pimpinan TPNPB wilayah Ngalum yakni Yulian Uropmabin dan Kapol Uropmabin, Lamek Taplo memberikan surat dan uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) untuk membeli senjata di Bougenville PNG yang difasilitasi oleh Jefri Bomanak.¹¹⁰ Diduga bahwa perdagangan senjata api dengan jaringan seperti ini sudah berlangsung relatif lama, sekitar awal tahun 2000 dengan jaringan dan jalur yang berbeda-beda.

(4). *'Face to Face' atau jaringan langsung TNI/POLRI dan TPNPB*

Beberapa peristiwa tertembaknya aparat TNI atau POLRI, diduga ada kaitannya dengan peristiwa transaksi senjata api atau amunisi yang langsung dilakukan antara TNI/POLRI dengan TPNPB. Seorang narasumber mengatakan, untuk di wilayah tertentu ada transaksi yang dilakukan secara langsung antara salah satu kelompok TPNPB dengan oknum polisi atau oknum TNI. Ketika ada salah satu kelompok (TPNPB) dekat dengan TNI, maka mereka

¹⁰⁹ Putusan Nomor : 50/Pid.Sus/2021/PN Mnk

¹¹⁰ Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2021/PN WMN

cenderung bertransaksi dengan TNI, begitupun sebaliknya. Namun hubungan itu tidak berlangsung lama karena transaksi seperti itu biasanya 'diakhiri' dengan jebakan. Yakni ketika akan dilakukan transaksi (untuk yang kesekian kalinya), salah satu pihak akan menggunakan kesempatan itu untuk menyergap atau menangkap sehingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh salah satu pihak. *"Ini tergantung siapa yang duluan ambil resiko, yang belakangan, akan jadi korban"*.¹¹¹

Mengingat begitu beragamnya jaringan PSAA maka kuat dugaan, PSAA tumbuh subur di Papua dengan melibatkan orang-orang tertentu. Jaringan ini memiliki matarantai yang cukup panjang mulai dari pemesan, perantara dan penyedia yang biasanya lebih dari 1 orang. Kuat dugaan keterlibatan oknum TNI/POLRI di setiap jaringannya. Salah satu contohnya, ketika MJH membeli senjata M4 pada Yogi penjaga toko Zona Air Gun di Cilandak, Yogi menyediakan M4 setidaknya sebanyak 3 kali sejak tahun 2018. Kuat dugaan senjata yang dijual oleh Yogi, kuat dugaan milik aparat. Sayangnya pada saat persidangan meski diketahui nomor seri dari senjata api tersebut, tidak dengan mudah diungkap siapa pemiliknya. Hanya saja terhenti di nomor seri. *Mengungkapkan pemilik senjata sama halnya dengan mengungkap borok aparat lebih dalam,"* ujar seorang narapidana kasus amunisi yang ditemui Nabire.¹¹²

Demikian juga BB dari transaksi yang dilakukan oleh oknum aparat TNI/POLRI merupakan senjata yang berasal dari lingkungan TNI/POLRI. Mengingat PT di Pindad adalah milik negara maka informasi ke publik terkait dengan BB seharusnya dibuka, mengenai asal senjata atau amunisinya. Jika tidak bisa menjadi peluang yang aman bagi oknum aparat untuk terlibat dalam praktik perdagangan senjata dan amunisi.¹¹³

Menurut PS Kasubdit Kamneg Dirreskrim Polda Papua, Kompol Taufan Irdianto, S.SoS, masyarakat sudah memiliki jaringan senjata api yang mereka bentuk sendiri, namun semuanya itu bisa dimonitor oleh aparat keamanan. Tahun 2020 maupun 2021, aparat kepolisian berhasil mengungkap dan menangkap pelaku-pelaku penjual senpi tersebut. Adapun rute senpi yang dari luar (negeri), yaitu dari Filipina melalui

¹¹¹ Wawancara dengan Jordan (bukan anam sebenarnya), terpidana PSAA di Nabire, April 2022

¹¹² Wawancara dengan Herman (bukan anam sebenarnya), masyarakat sipil di Wamena November 2021

¹¹³ Leo Imbiri FGD Pra Investigasi PSAA, Jayapura, 6 September 2021

Sangihe ke Biak, lalu ke Manokwari Nabire. Itu rute-rute yang ada dari luar Papua. Ada juga yang berasal dari daerah-daerah konflik Ambon, Poso, dan Ternate. Namun untuk saat ini yang dari Sulawesi Utara sangat minim. Dari hasil penyidikan dan pengungkapan akan digunakan oleh kelompok KKB, namun semua itu bisa diantisipasi oleh pihak kepolisian. Aparat kepolisian bertindak secara kontinue dan *silent* karena jangan sampai dengan adanya keterbukaan terkait penyelidikan dan pencarian, diketahui oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.¹¹⁴

Modus baru yang dipakai untuk perdagangan senjata adalah dengan cara membongkar atau tidak dalam kondisi utuh. Diawal tahun 2021 Komando Resor Militer 172/Praja Wira Yakthi berhasil membongkar modus baru tersebut setelah prajurit TNI Korem 172/PWY berhasil menggagalkan pengiriman *sparepart* senjata api beserta amunisi. Menurut Komandan Korem 172/PWY, Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan pelaku penyelundupan tak lagi memasok senjata api ke Papua dalam bentuk utuh seperti sebelumnya.¹¹⁵ Pengiriman senjata dalam bentuk potongan merupakan salah satu modus untuk menghindari kecurigaan dari petugas bandara atau pelabuhan.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramandey bahwa saat dirinya bertemu salah satu tersangka yang ditangkap di Papua Barat, diketahui bahwa kini kebanyakan jual beli senjata dilakukan dalam bentuk tak utuh agar saat melakukan transaksi tidak mencurigakan.¹¹⁶ Modus ini sendiri sudah dipraktikan cukup lama hanya saja oknum aparat seringkali membawa dalam keadaan utuh dengan alasan senjata miliknya sendiri.

Menurutnya, hal yang penting diperhatikan adalah keterlibatan aparat TNI dan POLRI. Beberapa kasus transaksi amunisi illegal seperti dalam kasus Paniai, Intan Jaya, melibatkan oknum aparat. Selain itu ada juga pejabat yang terlibat bahkan sudah memiliki jabatan yang besar pun masih terlibat dalam menjalankan transaksi ini karena transaksi ini

¹¹⁴Wawancara dengan Kompol Tofan Irdianto, S, SoS, PS kamneg Dirreskrim Polda Papua, Jayapura 12 April 2022

¹¹⁵<https://www.viva.co.id/militer/militer-indonesia/1356410-jenderal-darah-kopassus-tni-bongkar-cara-baru-jual-senjata-ke-papua>

¹¹⁶https://kbr.id/nusantara/03-2021/dana_desa_di_papua_dicurigai_untuk_pembelian_senjata_ilegal/104911.html

sangat menggiurkan dilakukan dengan jumlah uang besar.¹¹⁷

Sayangnya, aparat penegak hukum sangat tertutup soal relasi diantara para terdakwa, mungkin saja ada petinggi aparat ikut terlibat dalam bisnis ini, namun ketika di pengadilan dan dihadirkan sebagai saksi, pengakuan aparat yang ikut terlibat tidak memaparkan secara jelas dan terperinci mengenai hal ini. Demikian juga sikap terdakwa cenderung tertutup namun demikian besar kemungkinan bahwa dana desa, dana RESPEK dan dana Otsus juga dipakai untuk membeli senjata api dan amunisi.¹¹⁸

Adapun terkait jalur yang digunakan :

Di tahun 2020 Polda Papua menangani penyalahgunaan senpi dan handak sebanyak 13 kasus.¹¹⁹ Kemudian pada saat refleksi semester I tahun 2021 Kapolda Papua, Irjen Pol Mathius D Fakhiri mengatakan sejak awal tahun 2021, pihaknya mulai melakukan penyekatan dampak dari kejadian anggota Brimob. Sehingga menutup jalur masuknya senpi ke Papua yang berasal dari Kabupaten Nabire, Merauke dan Manokwari dengan aktifnya Satgas Nemangkawi dan Polres jajaran khususnya dapat menutup akses di pintu masuk senpi di Nabire, Jayapura dan Timika.¹²⁰

Diakui oleh Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny Franky Sompie bahwa pengiriman senjata biasanya melalui jalur yang sulit diawasi. *"Seperti masuk lewat pantai, menggunakan perahu, atau lewat sungai-sungai,"*. Tapi, untuk jalur-jalur masuk resmi, pihaknya sudah bekerja sama dengan instansi terkait. Itu membuat kecil kemungkinan senjata api ilegal masuk lewat bandara atau pelabuhan resmi.¹²¹

Kedua petinggi kepolisian ini memastikan bahwa jalur-jalur masuk sudah ditutup termasuk jalur resmi. Akan tetapi pada kenyataannya, justru jalur resmi seperti bandara atau pelabuhan yang biasa digunakan oleh oknum aparat TNI atau POLRI melakukan PSAA secara illegal

¹¹⁷Wawancara dengan Ertris Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

¹¹⁸Wawancara dengan Gustaf Kawer SH, Msi, direktur PAHAM Papua Jayapura 2 Februari 2022

¹¹⁹<https://www.ceposonline.com/2021/01/06/49-kasus-ksb-menewaskan-5-anggota-tni-polri-dan-13-sipil/>

¹²⁰<https://www.ceposonline.com/2021/06/30/kasus-penjualan-senpi-meningkat-13-anggota-kkb-diamankan/> diupload pada 29 Juni 2021.

¹²¹ <https://www.jeratpapua.org/2014/08/07/dugaan-perdagangan-senjata-di-papua-dari-mana-asalnya/>

dengan memanfaatkan profesi mereka sebagai aparat TNI/POLRI.

Pada dasarnya PSAA menggunakan berbagai macam jalur seperti laut, udara dan darat, hal mana pada satu transaksi cenderung menggunakan lebih dari satu jalur karena keterbatasan sarana transportasi. Adapun jalur darat merupakan jalur yang relatif paling aman karena rutenya lebih dapat dikendalikan oleh pelaku di lapangan.

Pada dasarnya ada 3 jalur yang digunakan :

- Jalur darat : menggunakan jalur tertutup seperti sekitar hutan, jalan setapak atau rute mobil di pinggiran kota jalur ini diandalkan oleh TPNPB.
- Jalur laut atau sungai : menggunakan pelabuhan kecil dengan perahu/*boat* kecil cenderung digunakan oleh TPNPB adapun pelabuhan besar cenderung digunakan oleh masyarakat sipil dan TNI/POLRI
- Jalur udara : menggunakan penerbangan, biasanya oknum TNI/POLRI yang menggunakan fasilitas ini.

B. KETERLIBATAN APARAT KEAMANAN, DIMANA BATASAN ANTARA OKNUM DAN INSTITUSI?

Menurut John Habah, salah satu ciri dari negara-negara berkembang, ketika sumber daya manusianya banyak tersedia dan berbanding terbalik dengan kesejahteraan aparat militer dan kepolisian menyebabkan oknum- oknum aparat keamanan mencari pendapatan lain yakni dengan cara bisnis ilegal di daerah konflik, perjudian, penyelundupan, serta penjualan senjata api, yang kemudian menyeret mereka kedalam *criminal economy*.¹²²

Kondisi ini sudah tergambar dalam PSAA di Papua yakni ketika mereka menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki guna melancarkan bisnis senjata api terutama di daerah-daerah operasi militer. Begitu pula dalam melakukan penyeludupan senjata api lintas negara, para aparat menjadi *becking* dari pelaku penyeludupan, bahkan

¹²²John Habah, *Potensi Konflik Etnis di Asia Tenggara* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2005), 73

ikut membantu dalam melancarkan kegiatan transaksi penyeludupan senjata api dari luar negeri ke Indonesia. Hal tersebut dilakukan aparat militer dan kepolisian untuk terus memenuhi kebutuhan anggaran dalam melakukan operasi militer, kebutuhan hidup sehari-hari dan juga merupakan bagian dari usaha mempertahankan keberadaan operasi militer di daerah konflik agar bisnis illegal penyeludupan senjata api dan kegiatan lainnya terus melenggang tanpa adanya batas waktu.¹²³

Mantan ketua Sinode KIGMI Papua, Pdt. Benny Giay mempertegas dengan menyatakan TNI bersembunyi di belakang separatisme. Separatisme mesti dianalisa datang dari mana dan siapa yang melahirkan. Dikatakan bahwa antara bulan Agustus sampai November tahun 2021 hampir setiap minggu TNI/POLRI menjual senjata dan amunisi ke OPM. *“Ini saya anggap sebagai upaya TNI/POLRI untuk memelihara konflik di Papua,”* kata Benny Giay. Ia yakin, ada upaya dari pihak tertentu yang ingin memelihara separatisme tetap eksis dan bertambah kencang karena sudah terbukti TNI/POLRI bisa jual senjata dan amunisi.¹²⁴

Keterlibatan oknum TNI dan POLRI dalam hal perdagangan senjata api dan amunisi telah diakui Egianus Kogeya, Panglima Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III TPNPB Nduga, Papua, dikatakan bahwa dirinya membeli senjata dan amunisi dari militer Indonesia.¹²⁵ Biasanya, amunisi dibeli dari anggota TNI atau POLRI yang berada di lapangan setelah itu komunikasi dilanjutkan ke atasan atau pimpinan atau teman-temannya, setelah ada kesepakatan, kemudian jual beli dilakukan.

Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom mengakui senjata-senjata yang digunakan pihaknya dibeli dari oknum aparat keamanan Indonesia. Senjata-senjata itu didatangkan dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Hercules. Menurut Sebby, pembelian senjata itu bukan barang baru, melainkan sudah sejak lama mereka lakukan.¹²⁶

¹²³Jurnal Kriminologi Indonesia Volume V.No.II Agustus 2009: 31-46, Pola Penyeludupan dan Peredaran Senjata Api Ilegal di Indonesia, Anggi Setio Rachmanto

¹²⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150522210215-20-55142/masyarakat-papua-anggap-aparat-punya-andil-dalam-separatisme>

¹²⁵<https://suarapapua.com/2020/07/27/egianus-kogeya-saya-beli-senjata-dan-amunisi-dari-tni-dan-polri/>

¹²⁶<https://republika.co.id/berita/qisskh354/tpnpb-opm-akui-sejak-lama-beli-senjata-dari-aparat-indonesia>

Khairul Fahmi dari Institute For Security and Strategic Studies mengatakan jual beli senjata api, terutama di daerah konflik seperti di Papua, bukan hal baru. Ia menilai peredaran senjata dan amunisi adalah *“masalah sangat serius”* khususnya di Papua karena menyangkut jaminan keamanan dan perlindungan hukum warga negara. *“Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang berdimensi konflik di daerah itu yang melibatkan peredaran senjata api secara gelap, baik senjata api maupun amunisi”*. *“Keterlibatan oknum TNI dalam transaksi senjata api di Papua tidak cukup mengherankan. Itu bukanlah sesuatu yang ideologis. Ada kebutuhan, dana tersedia, komunikasi berjalan, kebutuhan tersedia, maka deal. Meski demikian tentu saja tidak dapat dibenarkan. Hal ini menunjukkan tingkat disiplin dan loyalitas sejumlah oknum anggota TNI masih dapat dikalahkan dengan uang. Dirinya juga menduga ada aspek lain yang harus diperhatikan seperti kemungkinan ada paksaan atau bahkan perintah dari oknum yang berpangkat jauh lebih tinggi.”*¹²⁷

Sebelumnya, pada 29 Januari 2015, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Franses G Siahaan mengatakan pihak TNI juga melakukan penyelidikan dugaan keterlibatan anggota TNI terlibat penjualan amunisi ke kelompok bersenjata di Papua. Menurutnya dugaan keterlibatan oknum anggota sebenarnya sudah lama diselidiki dan bagi oknum anggota yang terlibat tidak akan ditolerir. Peristiwa tersebut sudah dilaporkan ke KSAD dan perintah pelaku harus dipecat karena sudah tidak layak dan tidak patut lagi menjadi anggota TNI.

Demikian juga yang disampaikan oleh Jenderal Andika Perkasa saat menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, bahwa polisi militer masih terus bekerja untuk menjaga mentalitas personel TNI AD. *“Memang banyak yang harus kami perbaiki sehingga mungkin mereka tergoda. Saat masuk mungkin memang mereka setia. Tetapi dalam perjalanannya tergoda.”* Meski masih ada kelemahan, Andika menegaskan TNI AD tidak tinggal diam. Ia akan melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu sesuai hukum militer.¹²⁸

Kapuspen TNI Mayjen TNI Fuad Basya menambahkan penjualan senjata atau amunisi itu kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum

¹²⁷<https://www.suara.com/news/2021/02/24/132626/anggota-dpr-sebut-oknum-aparat-jual-senjata-k-e-kkb-papua-pengkhianat-negara>

¹²⁸Anggota TNI Jual Amunisi ke Kelompok Bersenjata di Papua (tirto.id) Diupload pada 14 Agustus 2014.

tertentu. Adanya jual beli senjata atau amunisi di Papua karena adanya permintaan. *“Ada yang perlu senjata atau amunisi, lalu ada yang perlu uang,”*. Fuad menegaskan, jika oknum-oknum yang menjual senjata atau amunisi itu ternyata dari TNI, maka akan diberi hukuman yang tegas. *“Sudah pasti akan dipecat. Kalau undang-undangnya oknum TNI yang menjual senjata atau amunisi itu boleh dihukum mati, pasti kami hukum mati”*.¹²⁹

Adapun gubernur Papua Lukas Enembe mencurigai adanya oknum TNI atau Polri yang menjual amunisi sisa tugas ke masyarakat Papua. Penjualan amunisi secara ilegal itu yang membuat konflik atau kontak senjata antara TNI atau POLRI dan kelompok separatis tak pernah berhenti. Lukas mengatakan, kecurigaan itu muncul didasari oleh ketatnya pengawasan pada senjata api atau amunisi yang masuk dan keluar di Papua. *“Keamanan di Papua sangat ketat, sehingga sulit membawa senjata atau amunisi ilegal dari luar Papua. Kecuali membeli dari aparat yang bertugas di Papua,”*.¹³⁰ Dengan alasan itu, ia sangat yakin bahwa peredaran senjata dan amunisi milik separatis di Papua berasal dari oknum TNI atau POLRI.

Ketua Panja Papua di DPR RI, Yoris Raweyai, juga menyatakan kecurigaan yang sama. Menurutnya, berdasarkan penyitaan senjata dari kelompok separatis di Pulau Yapen, Papua, diketahui bahwa amunisi yang digunakan kelompok tersebut merupakan produksi dalam negeri (PT Pindad). Kelompok separatis itu juga tak pernah kehabisan amunisi meski senjatanya hanya senjata rakitan. Menurutnya amunisi yang dipasok ke personel (TNI/POLRI) yang di-BKO, waktu kembali, (amunisi) tidak dibawa pulang.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menyebut aparat yang melakukan jual-beli senjata api dan amunisi kepada kelompok separatis seperti KKB di Papua, sudah melakukan penghianatan terhadap NKRI dan layak dihukum seberat-beratnya. Apalagi pelakunya adalah oknum TNI-POLRI.¹³¹ Hal yang sama disampaikan oleh Anggota Komisi I DPR RI Yan Permenas Mandenas yang meminta aparat TNI dan POLRI memperketat jalur darat, air, dan udara untuk menjaga lalu

¹²⁹<https://suarawiyaimana.blogspot.com/2015/05/gereja-papua-yang-beli-senjata-disebut.html>

¹³⁰<https://www.liputan6.com/news/read/819864/gubernur-papua-oknum-tni-polri-jual-amunisi-ke-warga-lokal>

¹³¹Anggota TNI Jual Amunisi ke Kelompok Bersenjata di Papua (tirto.id)

lintah dalam rangka pencegahan jual beli senjata dan amunisi kepada KKB di Papua. Menurutnya aparat harus melakukan evaluasi penggunaan amunisi oleh pasukan organik maupun anorganik sehingga amunisi itu tidak sampai diperjualbelikan kepada KKB. Selain itu, evaluasi perdagangan senjata harus dilakukan. Mengingat perdagangan senjata kepada KKB diketahui disuplai oleh oknum anggota TNI dan Polri. Para oknum tersebut menjadi pemasok senjata KKB, di mana senjata dan amunisi yang sama digunakan kelompok itu untuk menyerang aparat.¹³²

Pada 24 Pebruari 2021, Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kepolisian Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap personilnya di lapangan. Permintaan Andi itu didasarkan pada insiden dua oknum anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada KKB di Papua. Ia juga meminta Polri berani menyelidiki dalang di balik perdagangan senjata ilegal di Papua.¹³³ Ketika Natus Murib alias Neson Murib ditangkap pada tanggal 15 Juni 2021 yang diduga jaringan pengadaan senjata api (senpi) dan amunisi ke KKB di Puncak Jaya, Papua, ketua MPR Bambang Soesatyo juga telah meminta agar aparat menggali informasi mulai dari sumber dana hingga aktivitas pengiriman uang untuk membeli senjata api dan amunisi dari terduga pelaku.¹³⁴

Titik yang paling lemah dan fundamental adalah soal pengawasan. Pengawasan terkait senjata api yang keluar dari gudang senjata, bagaimana protapnya (apakah peluru hampa, karet dan tajam), bagaimana megazineranya apakah Panjang (15mm, 20mm, 25mm) atau yang pendek (5mm,). Demikian juga ketika dikembalikan ke gudang senjata api perlu diregister oleh komandan regu dan jika ada yang kurang, maka perlu dipertanyakan(ditelusuri) penggunaannya untuk apa dan berapa banyak tembakan pada saat latihan, ataukah ada tembakan peringatan dan mengapa melakukan penembakan peringatan?. Intinya setiap kali sebutir peluru yang keluar harus ada

¹³² <https://www.suara.com/tag/aparat-tni-polri>

¹³³<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/24/14564701/soal-kasus-jual-beli-senjata-kkb-papua-komisi-iii-dpr-minta-polri-transparan>

¹³⁴<https://www.liputan6.com/news/read/4584364/ketua-mpr-minta-satgas-nemangkawi-investigasi-penjual-senpi-ke-kkb-papua>

berita acaranya. Inilah kemungkinan-kemungkinan lemahnya pengawasan di internal TNI/Polri.¹³⁵

Selain itu setiap senjata api memiliki nomor seri sehingga seharusnya setiap senjata api yang diperjualbelikan dapat ketahui secara pasti dibawah penguasaan siapa demikian juga amunisi yang diperdagangkan. Apalagi biasanya transaksi dilakukan ketika senjata api sudah didistribusikan ke kesatuan masing-masing dan bukan di tahap awal setelah diproduksi. Hal ini menunjukkan kontrol yang lemah terkait distribusi dan penggunaan senjata api dan amunisi dari institusi. Misalnya kontrol dari Korem ke jajaran Kodim atau Polda ke jajaran Polres. Senjata api dan amunisi yang sudah disimpan digudang, seharusnya dipastikan aman dan tidak berkurang, oleh petugas yang berwenang kecuali digunakan secara resmi termasuk melakukan pemeriksaan rutin terhadap personil yang memiliki akses terhadap penyimpanan senjata api dan amunisi.

Selain itu lemahnya integritas dalam menjalankan peran dan tanggungjawabnya bahkan ada oknum TNI dan POLRI yang melakukan transaksi berulang kali dengan menggunakan berbagai alasan di kesatuannya agar mendapatkan senjata atau amunisi secara illegal. Padahal pelaku yang berasal dari TNI atau POLRI menyadari bahwa senjata atau amunisi untuk digunakan oleh kelompok TPNPB.

Keterlibatan aparat dalam menjual amunisi dan senjata api biasanya dianggap sebagai perilaku oknum dan bukan perilaku institusi militer, sehingga kasusnya terhenti pada oknum anggota TNI/POLRI. Jaringan transaksi ditubuh institusi tidak lagi diselidiki meskipun kejadiannya terus berulang. Kondisi ini harus dianggap kesengajaan untuk diabaikan oleh negara tanpa mengusut hingga tuntas. Meski selalu dikatakan sebagai oknum namun lebih dari satu orang yang terlibat pada satu kasus bukanlah hal sederhana untuk disebut sebagai perbuatan oknum. Ada semacam jaringan semi formal yang diketahui oleh atasannya. Apabila atasan tidak bertindak tegas atau bahkan menyuplai kebutuhan transaksi senjata menunjukkan ada keterlibatan institusi.¹³⁶

Apalagi ketika pembuktian di persidangan, terungkap pihak yang

¹³⁵Wawancara dengan Fritis Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

¹³⁶FGD Draft Hasil Investigasi Perdagangan Senjata dan Amunisi di Papua, Jayapura, 8 Juni 2022

menyediakan senjata api berikut nomor seri senjata api yang digunakan sebagai BB. Namun peradilan berlangsung *as usual* yakni hanya mampu mengadili pelaku langsung(di lapangan). Sementara institusi TNI dan POLRI juga seolah membiarkan(sepakat) kasus tersebut selesai dengan cara seperti itu di pengadilan. Keterlibatan oknum aparat pada praktik perdagangan senjata api dan amunisi secara illegal ini telah terjadi secara terus menerus maka sudah saatnya institusi TNI dan POLRI dimintai pertanggungjawaban.

IV. GAP ANTARA BERITA DAN PUTUSAN PENGADILAN

A. COVER MEDIA MASSA CENDERUNG NARASI TUNGGAL

Kasus mengenai perdagangan senjata api dan amunisi seringkali menjadi 'trending topic' dalam berbagai pemberitaan di media massa. Mulai dari kronologis penangkapan, peran pelaku misalnya atas tuduhan sebagai penyuplai senjata ke TPNNP atau sebagai anggota TPNNP termasuk dugaan keterlibatan unsur pemerintah seperti Aparat keamanan(TNI/POLRI), anggota Legislatif, pemerintah sipil ataupun masyarakat sipil hingga dugaan keterlibatan Warga Negara Asing(WNA). Demikian juga mengenai Barang Bukti(BB) yang didapat pada saat dilakukan penangkapan.

Biasanya informasi terkait PSAA hanya bersumber dari aparat kepolisian(penegak hukum) apalagi ketika jurnalis yang menulis berita tidak berada di tempat kejadian perkara. Akibatnya pemberitaan yang cepat dan sepihak itu seringkali berdampak pada judul berita yang sangat tendensius seperti :

<https://...../nasional/20210923191228-12-698664/usai-ger-ebek-gudang-senjata-kkb-polisi-periksa-asn-yahukimo>

Dalam pemberitaan disebutkan bahwa tempat ditemukannya amunisi adalah ' *gudang senjata* ' padahal peluru ditemukan di dalam kamar dalam *speaker* rusak, tidak ada gudang senjata. Disebutkan juga "Adapun barang bukti yang diamankan diantaranya 26 butir amunisi 5,6 5TJ, 8 Butir amunisi 38 SPC, satu magazine M-16, *satu pasang pakaian loreng KNPB, berbagai senjata tajam tradisional dan alat-alat komunikasi*'. Padahal amunisi yang ada sebanyak 34 (tiga puluh empat) butir yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) butir amunisi bertuliskan

PIN 5,56 dan 8 (delapan) butir Amunisi bertuliskan TK PIN 38 dan 1 (satu) buah magazen. Adapun yang dimaksud dengan alat komunikasi adalah handphone milik ES. Selain itu tidak ada satu pasang pakaian loreng KNPB dan berbagai senjata tajam tradisional.

Misalnya juga penangkapan terhadap seorang turis WNA asal Polandia Warga negara Polandia Jakub Fabian Skzypski (JFS) pada Agustus 2018 dengan tuduhan awal melakukan perdagangan senjata. Pernyataan tersebut berbeda dengan yang disampaikan oleh supervisor imigrasi Jimmy P Sirait di PLBN Skouw, bahwa tak ada barang terlarang yang dibawa JFS saat memasuki Indonesia. Setelah melewati PLBN Skouw dan pemeriksaan di Pos Komando Taktis Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang sedang dijaga pasukan Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 501/Bajra Yudha Kostrad.¹³⁷ Polisipun tidak mendakwa dengan UU Darurat, namun berita di media massa sudah terlanjur menyudutkan JFS terkait PSAA.

Kecenderungan media untuk menggunakan narasi tunggal dari aparat keamanan atau aparat kepolisian diakui oleh Fabio Mario Costa, jurnalis Kompas di Papua, hal itu terjadi karena ada jurnalis yang tidak berada di tempat kejadian perkara, sikap aparat keamanan yang mendominasi informasi selain itu jurnalis mengalami kesulitan untuk mendapatkan narasumber lainnya dari masyarakat sipil. Salah satu yang diharapkan dapat membantu mengatasi situasi ini adalah dengan mengembangkan jurnalis warga.

Kini, narasi tunggal ini bukan saja muncul dari aparat keamanan atau penegak hukum tetapi muncul juga dari juru bicara TPNPB, misalnya terkait satu peristiwa. Padahal pada situasi konflik bersenjata yang meningkat, dimana kadang klaim dan tuduhan muncul untuk menggiring opini, maka perlu juga mempertimbangkan atau mendengar informasi dari pihak lain, masyarakat sipil misalnya agar mendapatkan gambaran peristiwa makin utuh dan jelas.

Terkadang kronologis peristiwa tidak ditulis secara detail, ada *framing* terkait pelaku, fokusnya pada pelaku bagian dari TPNPB atau KNPB adapun asal senjata, matarantai dan jalur transaksinya tidak disebut secara lengkap dan jelas. Penulisan dan isi pemberitaan lebih banyak berisi perspektif aparat keamanan, sehingga misalnya asal amunisi

¹³⁷<https://news.detik.com/berita/d-4233037/jejak-jakub-wn-polandia-di-plbn-skouw-yang-diduga-da-gang-senjata>

maupun senjata api yang dimaksud didapatkan dari oknum TNI/Polri justru jarang ditulis atau dihilangkan dan lebih banyak menulis tentang jaringan KNPB, TPNPB, dan OPM yang bertransaksi.¹³⁸

Demikian juga beberapa BB dari transaksi kadang tidak ditunjukkan fisiknya. Misalnya ketika media mengutip pernyataan Dandim 1715 Letko Inf Christian Ireuw terkait peristiwa tanggal 22 November 2021 di Suru-suru Yahukimo dikatakan KKB membeli empat pucuk senjata M-16 dan sekarung amunisi, namun '*sekarung amunisi*' itu tidak ditunjukkan. Demikian juga informasi terkait keterlibatan oknum aparat atau ASN atau tokoh tertentu kadang tidak jelas dengan argumentasi masih dalam penyelidikan aparat berwenang. Termasuk ketika persidangan, apalagi untuk sidang-sidang di pengadilan Militer, cenderung luput dari pemberitaan media. Peran Hubungan Masyarakat(Humas) Pengadilan pun sangat terbatas.

Akibat berita yang tidak tuntas, media massa ikut menuduh dengan *memframing* berita dan menyudutkan seseorang. Lebih jauh lagi, pemberitaan seperti ini turut membangun narasi mengenai peristiwa konflik bersenjata di Papua. Beberapa media *cenderung menyudutkan TPNPB sebagai kelompok separatis yang terus menciptakan konflik bersenjata tanpa mengurai lebih jauh mengenai keterlibatan oknum aparat keamanan dalam transaksi senjata dan amunisi*. Hampir tidak ada informasi pembanding dari pihak lain yang dapat diakses secara terbuka misalnya karena alasan keamanan meski memuat fakta yang sebenarnya.

Ada satu kecenderungan baru yakni makin banyaknya media yang bertugas untuk memperkuat narasi tunggal tersebut. Jadi berita yang memuat(mendukung) narasi tunggal makin banyak sehingga itu yang diikuti dan dianggap sebagai informasi yang benar. Leo Imbiri sekteraris DAP menambahkan bahwa ada penguasaan informasi dan kebijakan *mainstreaming* untuk menguasai media, tekanan yang besar pada media menjadi masalah dalam proses demokrasi. Dengan berkembangnya media sosial(medsos) sebenarnya dapat menolong sepanjang beritanya dapat divalidasi karena terkadang informasi dari medsos tidak terlalu kuat dan lengkap.¹³⁹

¹³⁸Wawancara dengan Gustaf Kawer SH, Msi, direktur PAHAM Papua Jayapura 2 Pebruari 2022

¹³⁹FGD Draft Hasil Investigasi PSAA di Papua, Jayapura, 8 Juni 2022

Menurut Gustaf Kawer, SH, Msi pada hakekatnya media harus independen yakni ketika melakukan pemberitaan harus menggunakan data primer bukan sekunder, sehingga perspektif terdakwa juga dimuat/diliput. Sayangnya pemberitaan lebih mementingkan perspektif negara dan mengabaikan perspektif masyarakat sipil yang ketika ditangkap media massa tidak mendapatkan akses untuk mendengar perspektif terdakwa. Pada saat proses pemeriksaan di kantor polisi, harusnya media juga ikut(memantau) dalam proses itu sehingga pemberitaannya benar dan seimbang tanpa menyudutkan pihak tertentu. Dalam beberapa kasus transaksi oknum aparat tidak diburu atau dicari oleh aparat keamanan, namun para terdakwa dari masyarakat sipil yang secara terus-menerus menjadi target yang diburu oleh aparat keamanan. Selain itu proses pemeriksaan di kepolisian seharusnya juga menggali informasi dari terdakwa atau pelaku tentang jaringan keterlibatan anggota Polisi maupun TNI, tetapi yang digali dan diburu justru jaringan dari kelompok KNPB atau TPNPB. Hal ini yang seharusnya penting bagi media untuk diliput.

Dikarenakan berita yang dimuat, cenderung saat peristiwa penangkapan (saja) adapun saat pelimpahan di Kejaksaan atau di Pengadilan, sudah tidak lagi dikawal, maka berita awal peristiwa itulah yang dianggap sebagai informasi yang benar 100% oleh publik.

B. HUKUM HANYA MENJERAT PARA PELAKU DI LAPANGAN

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. UU ini pada pokoknya memuat 2 pasal, berkenaan dengan larangan untuk memiliki, membawa, dan sebagainya, barang yang berupa “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dan juga “senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”. Kemudian pasal mengenai ancaman hukuman terdiri dari ancaman dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Meski pasal ini memuat ancaman yang tinggi namun putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim berkisar antara 4 tahun sampai dengan 6 tahun. Kecuali pada Pengadilan Militer yakni berkisar antara 10 tahun,

12 tahun dan seumur hidup, misalnya terhadap Pratu Demisla Arista Tefbana(DAT) yang divonis seumur hidup.

Adapun beberapa kasus yang menonjol pada periode 2011-2022 yakni :

1. Kasus Muhammad Jabir Hayan dkk - PN Nabire

Kasus ini merupakan rangkaian peristiwa PSAA sejak tahun 2017-2020(nilai transaksi sekitar 1,3 M) yang terjadi di Nabire dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari oknum anggota TNI AD, oknum anggota Paskhas TNI AU Lanud Sulaiman Bandung, mantan anggota TNI AD, oknum pendeta, oknum anggota DPRD hingga masyarakat biasa. Beberapa diantaranya sudah diproses, sebagian yang lainnya dalam status DPO namun ada juga yang tidak ditindaklanjuti meski namanya sempat disebut dalam penyidikan hingga pemeriksaan di pengadilan. Anggota Brimob BNPT dari kelapa Dua Depok yakni Muhamad Jabir Hayan (MJH) sebagai pelaku di lapangan.

MJH membeli senjata api 1 pucuk M16 seharga Rp.80 juta-Rp.90 juta dari sumber pertama, menjualnya seharga Rp.170 juta kepada perantara pertama yakni Fuad Ari Setiadi (FAS) dan Didi Candra(DC), keduanya terdakwa dalam berkas perkara terpisah, adapun FAS menerima uang sebesar Rp.300 juta dari pembeli utama.

Sementara untuk membawa senjata api dari Jakarta ke Nabire, MJH difasilitasi tiket pergi-pulang dan akomodasi oleh FAS atau DC. MJH menjual senjata api jenis M4 seharga Rp.100 juta dan menjualnya seharga Rp.125 juta, setidaknya telah melakukan transaksi sebanyak 8 kali, hingga kali kesembilan, dirinya ditangkap. Total transaksi senjata yang dilakukan MJH ke DC sebanyak 4 pucuk M4, 4 pucuk M16 dan 1 pucuk Glock sedangkan yang melalui FAS terdiri dari 3 pucuk M4, 1 pucuk M16 dan 2 Revolver. Adapun 1 pucuk M4 dan 1 pucuk M16 yang dibawa pada transaksi kesembilan, diamankan oleh aparat kepolisian.¹⁴⁰ MJH telah membawa senjata sebanyak 14 pucuk ke Nabire sesuai dengan jadwal pembelian sejak tahun 2017.

¹⁴⁰ Putusan Nomor : 18/Pid.Sus/2021/PN Nab

Awal terlibat melakukan transaksi di tahun 2017, MJH digunakan sebagai kurir saja oleh seorang anggota TNI AD (LIP) untuk membawa senjata api ke Nabire. Setelah berhasil sebagai kurir dikesempatan pertama MJH menawarkan dirinya sebagai perantara langsung (penyedia) sekaligus yang membawa hingga ke Nabire. MJH berhasil membuat dirinya dipertahankan dalam jaringan tersebut karena selalu tepat waktu dan aman. Apalagi dirinya bekerja dengan cepat, ketika tiba di Nabire, dirinya langsung meninggalkan Nabire pada hari yang sama. Hanya pada transaksi ke sembilan dimana dirinya harus bermalam karena rute penerbangan yang berubah/tidak stabil akibat Covid-19 dengan pengawasan yang ekstra ketat di bandara. Itulah yang menyebabkan resikonya makin tinggi sejak dirinya tiba di bandara hingga harus menitipkan senjata api yang dibawanya.

MJH terbilang sangat ahli, bahkan memiliki alibi yang cukup tinggi, misalnya sebelum ditangkap berusaha mengelabui petugas dengan masuk ke Polres Nabire kemudian mencari perlindungan dengan pergi ke Dan Sat Brimob Nabire dan menitipkan senjata pada Gudang senjata Mako Brimob Yon C Nabire dengan alasan dirinya transit di Nabire dari Timika karena baru saja mengawal dutabesar salah satu negara adidaya yang mengunjungi Timika.

Pada kasus MJH ada juga Agus Supartono (anggota TNI-AU kesatuan Paskhas Lanud Sulaiman Bandung), Yogi penjaga toko Zona Air Gun di Cilandak, Yogi menyediakan M4 setidaknya sebanyak 3 kali sejak tahun 2018. Kemudian Risky Wirawan penyedia senjata M16, M4 dan Glock sejak tahun 2018. Adapun yang turut diproses hukum yakni Fu'ad Ari Setyadi(FAS), Didi Chandra(DC) dan Pdt Paniel Kogoya (PK) dalam berkas perkara terpisah. Sedangkan Lantik Insan Prabowo(LIP) anggota TNI AD yang berdinasi di Kopassus Cijantung Jakarta pada tahun 2017 berstatus DPO, LIP adalah pihak yang menjual senjata pertama kali ke FAS pada tahun 2017 dan yang memperkenalkan MJH kepada FAS. Adapun yang tidak masuk DPO adalah Asep Rukhiat(AR) padahal AR menjual senjata ke MJH sebanyak 2 kali yakni 1 pucuk M16 pada akhir 2017 dan M4 pada Maret 2018.

Pada deretan nama pembeli ada beberapa orang yakni Sonny Kogoya alias Sonny, Titus Kobogau (DPO). Juga Pdt Paniel Kogoya yang ikut disidang dengan pidana penjara selama 4 tahun. Selain

itu ada nama DD anggota DPRD Kab Paniai yang pertama kali membeli senjata api laras panjang jenis M4 d dari FAS. Juga Junior Wanimbo anggota TNI AD berdinasi di Serui, awal tahun 2018 Junior Wanimbo telah memesan M16 kepada FAS.

Saat ditangkap pada 21 Oktober 2020, BB dari MJH terdiri dari M4 warna hitam dengan nomor seri : 01564, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 warna hitam dengan Nomor seri : 9367879, 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis glock warna cokelat dengan nomor seri : GPP L136569, 1 (satu) buah magazen dan 5 (lima) butir amunisi cal. 9 x 19 mm.

PN Nabire menjatuhkan hukuman ke MJH, FAS dan DC masing-masing 6 tahun penjara, ditahan di lapas Nabire kemudian atas permintaan MJH pemidanaannya dipindahkan ke daerah asalnya. Adapun Pdt PK divonis pidana penjara selama 4 tahun.

2. Kasus Desmisla Arista Tefbana dkk- PN Timika

Adapun untuk transaksi amunisi pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura dimana pelaku utamanya adalah Demisla Arista Tefbana(DAT) anggota Kodim 1710/Mimika. DAT memiliki *link* transaksi amunisi setidaknya dengan 5 anggota TNI AD terdiri dari : Prada DCL, Prada EKW, Pratu APT, Pratu NR dan Pratu M.S.LF kesemuanya anggota TNI bertugas di Mimika. Selain itu DAT juga memiliki *link* untuk pembelian senjata api, DAT membeli dari Pratu Addan Sangkian(AS) yang bertugas sebagai Protokol Brigif-20/IJK di Bandara Soekarno Hatta Jakarta. Pratu AS menjual 2 pucuk pistol seharga Rp.30 juta kemudian DAT menjualnya seharga Rp.100 juta ke Moses Gwijangge. DAT juga membeli 2 pucuk senjata rakitan dari Pratu Asep Mahpul (Pratu AM) melalui Pratu AS yang mengirimkannya dengan menitipkan pada seorang penumpang pesawat Garuda tujuan timika, lalu Pratu AS menghubungi Protokol Brigif-20/IJK di Bandara Timika Kopda M dengan alasan ada kiriman barang dinas.

Bahkan pada Mei 2019, Pratu AS dihubungi kembali oleh Pratu AM untuk mengambil pesanan senjata DAT di kediaman pribadi Pangdam Siliwangi berupa 2 pistol, 2 magasin, dan 6 butir amunisi

yang dikirim melalui bandara Soekarno Hatta.¹⁴¹ Masih dengan harga yang sama yakni Rp.30 juta untuk 2 pistol. DAT menjual amunisi ribuan butir dijual dengan harga Rp.100 ribu/butir. Senjata api yang dibeli seharga Rp.13 juta/satuan dijual Rp.50 juta/satuan kepada Moses Gwijangge.¹⁴²

DAT juga menerangkan bahwa keterlibatannya pertama kali berawal saat melakukan pengaman daerah rawan(Pamrahwan) pada bulan Juni 2016 di Distrik Jita dan berkenalan dengan Sdr. Moses Gwijangge(MG), selanjutnya MG meminta amunisi senjata api kepada DAT untuk diberikan kepada kelompok separatis bersenjata atau OPM dengan harga 1 (satu) butir munisi senjata api sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga DAT tertarik dengan penawaran MG. Setidaknya ada 3 kali transaksi amunisi antara DAT dengan MG yakni pada Juni 2018 sebanyak 150 butir, Agustus 2018 100 butir dan Januari 2019 sebanyak 100 butir.

Pada keterangan di persidangan DAT mengatakan telah melakukan transaksi sejak Juni 2018. DAT diadili pada pengadilan Militer III-9 Jayapura dengan 4 Nomor berkas perkara yakni Nomor 18-K/PM-III-19/AD/I/2020 dengan putusan pidana penjara selama 4 tahun, 19-K/PM-III-19/AD/I/2020 putusan pidana seumur hidup dan dipecat dari dinas militer, 20-K/PM-III-19/AD/I/2020 3 tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, serta 21-K/PM-III-19/AD/I/2020 selama 4 tahun.

3. Kasus Durri Jayyid dkk- PN Nabire

Biasanya oknum TNI yang terlibat, berstatus disersi kemudian dipecat seperti FAS ataupun Durri Jayyid(DJ) alias Doni alias Joni. Oknum seperti ini masih memelihara jaringan di institusinya yang digunakan untuk mendapatkan amunisi. Misalnya DJ mendapatkan amunisi dari Muhammad Bagus Jayadi, sejumlah ± 310 (tiga ratus sepuluh) butir amunisi dengan total Penjualan Rp22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga dari Rustan

¹⁴¹Putusan Nomor : 18-K/PM.III-19/AD/I/2020

¹⁴² Putusan Nomor : 21-K/PM.III-19/AD/2020

sejumlah 50 (lima puluh) butir. Adapun Muhammad Bagus dan Rustan Effendy merupakan anggota TNI AD Denzipur 12 Nabire.¹⁴³

DJ memiliki jaringan sipil yang terdiri dari Jaya Wahyu Irianto(JWI), Rupinus Nabelau(RN), Martinus Aroju(MA) dan Rabo(R), kesemuanya disidang pada perkara Nomor: Nomor.59/Pid.Sus/2021/PN Nab. DJ menjual amunisi yang didapat dari Rustan ke JWI dan MA dengan kisaran harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) / butir. Amunisi yang dibeli oleh JWI sebanyak ±125 (seratus dua puluh lima) butir amunisi, kemudian JWI menjual amunisi Sdr. Feri yang merupakan kakak kandung pterdakwa RN dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) / butir. Adapun yang masuk dalam DPO adalah Demianus Wantagau, Feri dan sdr Gobay sebagai pembeli dan Ulla sebagai penghubung dengan penjual di Makasar. Rabo yang membawa senjata api dari Makassar ke Kabupaten Manokwari dengan menggunakan kapal laut kemudian menggunakan jalan darat melewati Kabupaten Wasior menuju Kabupaten Nabire. Jaringan yang dimiliki oleh Rabo setidaknya sudah ada sejak tahun 2019 kemudian baru ditangkap pada Pebruari 2021.

PN Nabire memutus JD, JWI, RN, MA dan Rabo dengan pidana penjara masing-masing selama 5 tahun.

4. Kasus Sermumes dkk- PN Nabire dan PN Manokwari

Kasus ini diawali dengan komunikasi antara Sony Sermuwes (SS) dengan Rosita Budiman (RB) yang bertempat tinggal di Sangihe, menanyakan penjualan senjata api. SS mendapatkan nomor kontak RB dari Septinus Inden yang sebelumnya menanyakan pada SS apakah ada yang mau beli senjata. SS kemudian menghubungi RB, saat itu RB meminta agar SS langsung datang ke Sangihe, SS pun berangkat ke Sangihe. Setelah itu SS balik ke Manokwari. Tidak lama kemudian SS kembali ke Sangihe bersama Melki Sermumes(MS) dan Yohanis Zagani-YZ(DPO) untuk bertemu RB, masih melanjutkan pembicaraan mengenai jenis senjata api dan harga yang ditawarkan. Setelah itu mereka kembali ke Manokwari.

¹⁴³ Putusan Nomor : 59/Pid.Sus/2021/PN NAB

Selanjutnya YZ mengirim uang ke rekening RB sebanyak 17 kali sejak akhir Juli 2020 hingga akhir September 2020 dengan total transfer Rp.318.000.000.¹⁴⁴

RB memesan senjata api ke Janjan Barahma(DPO) di Philipina dengan mengirimkan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Kantor Pos di Manado dengan alamat General Santo Sutih. Janjan RB juga menjemput senjata yang diantar langsung oleh Janjan Barahma dengan menggunakan speedboat ke pelabuhan tikus pulau Benglout, berjarak sekitar 6 jam dari Philipina dan menyerahkan pistol sebanyak 12 pucuk. SS dan MS menjemput senjata tersebut di Sangihe. SS dan MS balik menggunakan Kapal KM. Sinabung dengan tujuan Biak sedangkan SS ke Manokwari. Sesampainya di Pelabuhan sorong, SS turun dan membawa 1 (satu) karton yang berisikan 6 (enam) pucuk senjata api beserta amunisinya, kemudian menggunakan jalur darat ke Manokwari. Adapun MS saat diperjalanan antara pelabuhan Sorong-Manokwari menghubungi anaknya yakni Calvin Sermumes(KS) untuk naik ke kapal menemuinya di pelabuhan Manokwari. Pada kasus ini, RB ditangkap dan diproses di PN Manokwari, selain itu ikut diproses adalah SS, MS dan KS.

Pada persidangan diterangkan bahwa transaksi senjata api melalui jalur Sangihe Talaud dengan membeli senjata dari Filipina. Rute yang digunakan adalah dari kampung Dagho distrik Tamako menggunakan mobil kemudian menyambung dengan motor laut ke Pantai Salurang pulau Benglout(pelabuhan tikus). Kemudian dari Sangihe menggunakan kapal cepat ke pelabuhan laut di Manado untuk ke Papua dengan menggunakan KM Sinabung.

PN Manokwari memutus SS dengan pidana penjara selama 7 tahun, KS dengan pidana penjara selama 4 tahun dan RB 4 tahun 8 bulan adapun PN Nabire memutus MS dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan.

5. Kasus Dua Uropmabin -PN Wamena

Dua Uropmabin yakni Yulian Uropmabin dan Kapol Uropmabin,

¹⁴⁴ Putusan Nomor : 51/Pid.Sus/2021/PN Mnk

merupakan anak buah dari Lamek Taplo TPNPB wilayah Ngalum. Lamek Taplo memberikan surat dan uang tunai sebesar Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah) kepada keduanya untuk membeli senjata di Bougenville PNG yang difasilitasi oleh Jefri Bomanak.¹⁴⁵

Jalur perjalanan untuk memperoleh senjata api diawali dari bandara Okhikha di Kiwirok (Pegunungan Bintang), Sentani, perbatasan PNG kemudian jalan kali ke Markas Victoria dan menuju Vanimo. Vanimo ke Port Moresby. Sewaktu di PNG, YU bersama Jefri Bomanak melakukan transaksi di Bougenville dengan menggunakan pesawat dari Port Moresby. Adapun perjalanan balik melalui jalur laut menggunakan *speed boat* dari Bougenville ke Vanimo dengan waktu tempuh selama 5 (lima) hari. Sesampai di Vanimo YU dijemput 2 (dua) orang anak buah Jefri Bomanak menggunakan satu unit mobil dan melanjutkan perjalanan selama 4 (empat) jam sampai tiba di Markas Victoria. Perjalanan dilanjutkan ke distrik Green, keesokan harinya bersama 3 (tiga) orang *motores* menggunakan perahu membawa senjata api dan amunisi. Dua Uropmabin sempat bermalam karena perahu yang ditumpangi mengalami rusak mesin. Barang-barang bawaan termasuk senjata, dipindahkan ke perahu yang lain. Senjata api tersebut sempat diturunkan kembali sambil menunggu *motores* ke distrik Batom. Setelah itu mereka berjalan sekitar 1 jam untuk bertemu dengan *motores* di Muara antara kali Oksip dan kali Okyako.

Keduanya ditangkap tanggal 7 September 2021 oleh 2 (dua) Anggota Pos TNI AD Batom, 10 (sepuluh) orang LINMAS dan masyarakat di pinggir Kali Okyako Kampung Muara Distrik Batom Kab. Pegunungan Bintang selanjutnya dibawa ke Pos TNI AD Batom. Jaringan di PNG cenderung merupakan jaringan yang sangat tertutup karena dilakukan langsung oleh TPNPB di PNG dan TPNPB di Papua.

Pada hari rabu tanggal 8 September 2021 sekira pukul 08.00 WIT, Yulian Uopmabin dan Terdakwa Kapol Uopmabin dijemput menggunakan Helikopter TNI AD dari Bandara Batom dan helikopter sempat transit di Bandara Senggi untuk mengisi BBM setelah itu melanjutkan perjalanan dan mendarat di Kodam XVII

¹⁴⁵ Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/2021/PN WMN tanggal 16 Desember 2021

Cenderawasih. Pada hari Kamis tanggal 9 September 2021 keduanya dibawa ke KOREM sampai dengan tanggal 17 September 2021 barulah dibawa ke POLDA PAPUA dan dimintai keterangan.

Di dalam putusan pengadilan, keduanya mengakui bahwa 5(lima) pucuk senjata yang dibeli berasal dari PNG. Yakni :

- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri : 8164893 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis FN FAL Nomor seri : AD7305128 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis Shotgun MOD 586 80910 berwarna hitam;
- 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang M2 Field Shotgun; dan
- 1 (satu) pucuk GLM 40 mm Nomor seri : 181444 berwarna hitam (terpasang pada senjata api laras panjang jenis M16 A2 Cal 5,56 Nomor seri terhapus berwarna hitam);

PN Wamena memutus keduanya dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 10 bulan.

Dari segi waktu frekwensi transaksi senjata api dan amunisi meningkat pada periode-periode tertentu, misalnya bertepatan dengan realisasi dana-dana bantuan khususnya dana desa. Biasanya dimulai pada bulan Juli hingga Oktober. Meski demikian pembelian senjata api dan amunisi tidak dapat dilakukan dengan cepat. Senjata api dan amunisi yang dipesanpun tidak langsung tersedia. Pembeli harus menunggu berbulan-bulan. Bahkan ada saat dimana, pembeli sudah menyetorkan uang kepada perantara, senjata api atau amunisi yang dipesan belum ada, hingga kemudian perantara ditangkap oleh aparat penegak hukum.

Hal ini dapat dilihat pada kasus Naftali Tipagau(NT) yang disidang di Pengadilan Negeri Nabire dengan nomor Putusan: 53/Pid.Sus/2021/PN Nabire tanggal 30 Juli 2021, NT ditangkap dalam kasus yang ada kaitannya dengan terdakwa Paulus Tebay(PT). Salah satu BB merupakan selembur kertas berisi catatan bahwa pihak pembeli telah menyetor uang sejumlah 2,2 milyar rupiah kepada perantara yakni FN. Naftali diminta untuk membantu menagih

kembali uang tersebut karena senjata yang dijanjikan tidak kunjung diberikan. Naftali kemudian dipidana selama 4 tahun penjara. Kasus mirip kasus Ratus Murib alias Neson Murib, saat ditangkap ada sejumlah BB yang berisi bukti transfer uang dari rekening Ratus Murib melalui Bank Papua dan Bank BRI ke 4(empat) orang dengan jumlah masing-masing sebanyak: Rp.23.006.000; Rp.40.026.000, Rp.50.000.000 dan 73.100.000. Namun tidak ditemukan senjata api sebagai BB. Ratus kemudian dihukum percobaan secara tanpa hak untuk mencoba memperoleh suatu senjata api dengan pidana penjara selama 2 tahun.¹⁴⁶

Pada beberapa kasus proses hukum terhadap para pelaku tidak dilakukan sekaligus karena waktu penangkapan yang berbeda-beda. Selain itu ada sejumlah nama yang masuk DPO namun ada juga pihak tertentu meski namanya disebut dalam BAP namun tidak dilakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan. Adapun para pelaku yang berasal dari aparat TNI, diproses melalui peradilan militer III-9 Jayapura. Informasi terkait persidangan di Peradilan militer masih sangat terbatas sehingga sulit untuk diikuti, kecuali dengan membaca putusannya.

Pelaku yang berperan sebagai perantara berasal dari berbagai profesi seperti anggota TNI/POLRI, ASN, mahasiswa, tukang ojek, masyarakat atau petani, mendapatkan imbalan terutama dalam bentuk uang. Rata-rata pelaku perantara ini menerima bayaran dalam bentuk uang namun ada juga yang memberikan amunisi gratis kepada temannya atau ada yang mendapat imbalan bahan pokok makanan, gula, kopi, teh dan rokok. Situasi ini tergambar juga pada kasus di Wamena tanggal 3 Juni 2018, dimana Eki Wanena alias Andris Wenda adalah kurir yang mencarikan amunisi, bertemu dengan seorang petani tua yang bernama Watlarik Hiluka sedangkan Roy Hiluka adalah anak muda yang menghubungkan antara Eki Wanena dan Watlarik. Sebelumnya Watlarik telah dititipkan amunisi oleh salah seorang anggota Kodim Wamena untuk dijual, demikian pengakuannya di PN Wamena. Upah yang didapat hanya beberapa bungkus rokok sedangkan Watlarik Hiluka mendapatkan bahan pokok seperti gula, kopi dan teh karena saat itu dia akan belanja bahkan pokok tersebut untuk keperluan di rumahnya.

¹⁴⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec32eadd2221a69d70313034383035.html>

Demikian juga dijelaskan oleh Frits Ramandey, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, 'siapa saja dapat menjadi perantara'. Misalnya kasus Nabire, perantaranya adalah anggota (TNI dan POLRI) dan kasus Timika yang turut membeli justru anak usia SMA, yang ditangkap ketika anak tersebut hendak naik ke pesawat. Selama ini, ada juga anak sekolah yang dipakai untuk memantau jalannya penjualan senjata api dan amunisi di Papua. Dalam kasus di Puncak Jaya, yang memantau aman tidaknya lokasi ataupun jalur transaksi amunisi adalah anak sekolah usia SMA. Sudah sejak lama anak sekolah dijadikan sebagai perantara dan juga pemantau. Jadi siapa saja bisa menjadi perantara meskipun yang dijerat dengan hukum biasanya orang yang secara langsung melakukan transaksi tersebut.¹⁴⁷

Selain itu anggota KNPB seringkali menjadi target utama sebagai pelaku transaksi padahal kurirnya bisa siapa saja. Berkaitan dengan pelajar, kadang media massa menuduhnya sebagai anggota KNPB padahal ketika didalami barulah diketahui jika mereka adalah pelajar dan mahasiswa.¹⁴⁸

Ada juga transaksi yang melibatkan seorang tokoh agama. Saat persidangan tokoh agama ini mengakui posisinya yang dilematis sebagai tokoh agama sekaligus sebagai orang yang dituakan dari sukunya. Saat diminta bantuan untuk mencarikan senjata, dirinya tidak mampu menolak karena khawatir akan dimusuhi atau disingkirkan dari komunitasnya.¹⁴⁹ Sebagaimana keterangan terdakwa Peniel Kogoya(PK) di PN Nabire atas kasus PSA dengan Nomor Perkara No:PDM-18/R.1.17/Eku.2/05/2021. Dirinya mengenai Fuad Ari Setiadi(FAS) terdakwa dalam berkas perkara terpisah diawali dengan bertukar pengalaman tentang proyek-proyek kemudian membahas mengenai berburu dan persenjataan. Di tahun yang sama dirinya juga didatangi oleh dua orang suku Nduga dari Kabupaten Nduga yakni Jhon Gwijangge dan Ges Gwijangge dengan tujuan meminta tolong untuk mencari orang yang menyediakan atau menjual senjata. PK juga menerima uang untuk membayar senjata dari Jhon Gwijangge dan Ges Gwijangge tetapi tidak bertanya sumber uang tersebut.

¹⁴⁷Wawancara dengan Frits Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

¹⁴⁸Wawancara dengan Gustaf Kawer SH, Msi, direktur PAHAM Papua Jayapura 2 Februari 2022

¹⁴⁹Nota Pembelaan Tim PH Pendeta Peniel Kogoya, PN Nabire, 26 Juli 2021

Ketika persidangan biasanya pengungkapan jaringan atau pihak-pihak yang terlibat hanyalah mereka yang berinteraksi langsung misalnya para perantara atau kurir sedangkan pihak yang menyediakan senjata dan memberikan uang beberapa diantaranya tidak diproses. Pengadilan fokus menyidangkan berkas yang sudah dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum(JPU) adapun untuk mengungkapkan atau menangkap pihak yang menyediakan senjata dan uang, menjadi tanggungjawab dari aparat kepolisian.

Pengadilan juga menetapkan transaksi amunisi sebagai perbuatan pidana berlanjut untuk kasus tertentu, misalnya pada kasus terdakwa MJH. Majelis mengatakan bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah menjual dan membawa senjata api pesanan FAS dan DC sebanyak 9 (sembilan) kali dengan total jumlah senjata api yang dibawa dan diserahkan oleh sebanyak 14 (empat belas) pucuk senjata api. Hal mana perbuatan-perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan pidana yang sejenis yaitu perbuatan tanpa hak membawa dan menyerahkan senjata api yang dilakukan dilakukan Terdakwa secara terus menerus selama bertahun-tahun sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2020.¹⁵⁰

Pada pertimbangan Majelis Hakim pada putusan dengan terdakwa DAT, disebutkan, terdakwa sudah menyadari pada dirinya merupakan prajurit infanteri yang berdinis dilingkungan Kodim 1710/Mimika yang tugas pokoknya sebagai anggota Intelejen satuan yang seharusnya bisa memberikan informasi dan data yang akurat tentang keberadaan, kegiatan dan perkembangan situasi yang terjadi diwilayahnya termasuk keberadaan dan perkembangan kegiatan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) di Kabupaten Timika, hal ini menunjukkan sifat dan kepribadian yang sangat buruk dan sama sekali tidak mempunyai disiplin pada diri Terdakwa sebagai prajurit infanteri karena hanya mengutamakan kepentingan pribadi. Terdakwa sudah mengetahui apabila selain Prajurit TNI yang bertugas di Papua adalah Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) yang digerakan oleh OPM yang membutuhkan banyak amunisi tajam kaliber 5,56 mm. Terdakwa juga sudah sangat paham dan mengerti bahwa tujuan menjual amunisi tajam kaliber 5,56 mm kepada Sdr. Moses Dwijange

¹⁵⁰Putusan Nomor:18/Pid.Sus/Nabire/2021, hal 59

untuk diserahkan dan digunakan demi kepentingan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang digerakkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM).¹⁵¹

Majelis hakim juga menyebutkan ada 5(lima) akibat dari perbuatan terdakwa yakni : kekuatan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata semakin bertambah dengan adanya suplai amunisi tajam caliber 5,56 mm dari Terdakwa, Meningkatnya teror dan gangguan penembakan, penghadangan yang mengakibatkan korban luka maupun korban meninggal baik dari pihak masyarakat, TNI-POLRI dan KKSBB sendiri., Menimbulkan kerugian bagi Negara yang berupaya mendukung tercapainya tugas pokok TNI dalam bidang pertahanan dan keamanan. Khususnya bagi Satuan Kodim 1710/Mimika yang berada digaris terdepan Teritorial di wilayah Timika yang merupakan salah satu jalur pelintasan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata, Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan baik antara TNI dan rakyat sehingga dapat mengganggu pembinaan teritorial TNI dalam mempersiapkan potensi pertahanan negara, utamanya di wilayah papua; dan Meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga dan masyarakat terutama masyarakat di sekitar satuan Terdakwa (Timika), utamanya wilayah yang terdampak langsung adanya teror penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata sehingga kehadiran satuan teritorial Kodim 1710/Mimika dan jajarannya keberadaannya dianggap tidak mampu dan tidak berpihak kepada masyarakat setempat.

Hal lain yang menjadi hambatan karena proses persidangan biasanya berlangsung cepat, dimana penasehat hukum dari terdakwa tidak diberikan cukup waktu untuk menggali lebih jauh mengenai matarantai transaksi dan sumber dana untuk membeli senjata. Hal ini dikarenakan, pengacara baru ditunjuk untuk mendampingi saat sudah masuk pemeriksaan dipersidangan bukan pada tahap awal pemeriksaan di tingkat penyidikan. Sehingga pengacara kesulitan untuk mendapatkan informasi yang lengkap ataupun berkomunikasi dengan klien secara maksimal. ¹⁵²

¹⁵¹Putusan Nomor: 20-K/PM.III-19/AD/I/2020, hal 32-33

¹⁵²Wawancara dengan Marseus Tobing, SH, Advokat pendamping sejumlah Pelaku Transaksi Senjata dan amunisi di PN Nabire. Nabire 14 April 2022

Kasus transaksi senjata api dan amunisi sarat dengan kepentingan institusi atau *design* institusi terkait bisnis militer dan bukan soal perilaku oknum. Jika perilaku oknum maka gampang sekali untuk ditangkap dan diproses, tetapi ketika ini menjadi perilaku institusi maka petinggi-petinggi militer dan kepolisian bisa ikut terlibat didalamnya dan akan terbongkar. Dalam pemeriksaan di kepolisian, berkaitan dengan jaringan penjualan senjata dan amunisi, dari keterangan saksi, pelaku dan juga aparat seringkali tidak disampaikan secara terbuka dan seakan disembunyikan atau dijaga rapat. Hal ini mungkin dikarenakan untuk menjaga keamanan masing-masing pihak yang terlibat baik dari jajaran petinggi militer sampai pada kurir. Seringkali dipersidangan tidak terungkap secara jelas bagaimana proses transaksi itu berlangsung, siapa saja yang terlibat dan bagaimana mobilisasi dari satu daerah ke daerah lain. Hal ini susah untuk dibuka kebenarannya.¹⁵³ Adapun bagi oknum aparat yang menjual senjata, hukumnya harus berlapis dengan hukuman tambahan yang berat dan tidak ada tawar-menawar paling tidak seumur hidup sehingga ada efek jera bagi anggota lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat sipil yang membeli.¹⁵⁴

Semestinya satuan-satuan seperti TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan, memiliki tanggung jawab untuk mengungkapkannya di Pengadilan secara terbuka agar ada efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat dan ini tentu memberikan adanya pembenahan didalam satuan yang terlibat. Jarang sekali kita mendengar Humas Kejaksaan, Humas Pengadilan untuk mengumumkan atau *mempublish* putusan terkait kasus-kasus menonjol, khususnya kasus penjualan senjata api dan amunisi, ketimbang kasus-kasus korupsi dan lainnya. Ancaman terhadap kasus penjualan senjata api dan amunisi adalah ancaman nyata terhadap keamanan dan keselamatan rakyat dan negara. Sehingga ketika hukumannya ringan dan tidak *publish* maka perlu diselidiki mengapa hal ini tidak *dipublish*. Jarang sekali humas pengadilan menginformasikan kasus-kasus yang selama ini ditangani terutama kasus-kasus yang mengancam keselamatan masyarakat sipil.

155

¹⁵³Wawancara dengan Gustaf Kawer SH, Msi, direktur PAHAM Papua Jayapura 2 Pebruari 2022

¹⁵⁴Wawancara dengan Frtis Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

¹⁵⁵Wawancara dengan Frtis Ramandey Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua Jayapura 6 April 2022

V. KESIMPULAN

1. Perdagangan senjata api dan amunisi secara ilegal yang terjadi di Papua memicu meluasnya konflik bersenjata antara TNI/POLRI dengan TPNPB, menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan dan mengancam proses perdamaian di tanah Papua. Perdagangan ini terjadi melalui berbagai jaringan dan jalur yang melibatkan oknum TNI dan POLRI, legislator, ASN dan masyarakat sipil dari berbagai profesi;
2. Pengawasan dan evaluasi internal yang lemah pada institusi TNI dan POLRI telah menyumbang pada meningkatnya PSAA di tanah Papua. Hal mana keterlibatan oknum TNI dan POLRI yang terus menerus terjadi memberikan indikasi atau dugaan adanya keterlibatan institusi setidaknya ketidakmauan dan ketidakmampuannya institusi untuk mengungkapkan secara tegas dan transparan terkait pelaku yang berasal dari institusi serta menghentikan praktik berulang yang dilakukan oleh aparatnya.
3. Belum adanya pengawasan yang saling bersinergis antara pemerintah dalam hal ini instansi terkait dengan masyarakat sipil untuk mencegah praktik PSAA yang telah memicu konflik bersenjata yang terus meningkat dan menyebar terutama di ruang-ruang publik, hal mana telah mengorbankan masyarakat sipil khususnya OAP dan juga non OAP.
4. Proses hukum yang dilakukan selama ini belum sampai pada keberhasilan dalam mengungkapkan jaringan PSAA terutama pada pihak yang memiliki atau menguasai senjata api dan penyandang dana yang telah terlibat secara melawan hukum.
5. Media massa cenderung menjadi corong parapihak dengan menyampaikan narasi tunggal sementara ruang-ruang klarifikasi atau informasi pembanding dari masyarakat sipil masih sangat terbatas akibat represi yang dilakukan oleh penguasa untuk mengontrol media dan hak warga negara untuk mendapatkan informasi. Selain itu belum adanya mekanisme dan jaminan perlindungan hukum dan keamanan bagi para jurnalis dan masyarakat sipil yang bersuara terkait isu-isu sensitif seperti perdagangan senjata api dan amunisi.

VI. REKOMENDASI

1. Panglima TNI dan Kapolri melakukan evaluasi internal terkait produksi, mekanisme distribusi dan penguasaan senjata api dan amunisi termasuk pembatasan pembawaan, tata cara penyimpanan dan penggunaannya di setiap tingkatan dan pada jajaran aparat organik maupun non organik.
2. Aparat penegak hukum tidak saja memroses hukum atau mengadili para pelaku dilapangan terutama para perantara tetapi juga mengungkapkan jaringan perdagangan senjata api dan amunisi illegal termasuk pemilik/penyedia utama senjata api mengingat bahwa setiap senjata api memiliki nomor seri(diregister) sehingga dapat mencegah kejadian berulang dan impunitas bagi pelakunya.
3. Pemerintah dalam hal ini instansi terkait meningkatkan pengawasan di wilayah-wilayah potensial yang menjadi pintu masuk atau jalur PSAA. Sejalan dengan itu perlu dirumuskan sistem dan mekanisme pengawasan terpadu termasuk perlindungan hukum dan keamanan bagi masyarakat sipil khususnya pada wilayah publik dimana konflik bersenjata meningkat.
4. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap berbagai aturan yang berhubungan dengan kepemilikan dan penguasaan senjata api dan amunisi dengan menerapkan sistem yang lebih terintegrasi agar lebih efektif pengawasan di jajaran TNI, POLRI dan masyarakat sipil. Termasuk mengevaluasi kebijakan pengamanan terkait akses aparat TNI dan POLRI pada pelabuhan laut, pelabuhan udara atau tempat tertentu lainnya.
5. Pemerintah melakukan pengawasan yang efektif terkait penggunaan dana-dana bantuan secara khusus dana desa agar digunakan secara maksimal untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kampung-kampung dan peningkatan ekonomi rakyat.
6. Media massa lebih professional dan independen ketika menyampaikan informasi khususnya terkait perdagangan senjata dan amunisi selain itu perlindungan hukum dan keamanan terhadap para jurnalis sangat diperlukan. Sejalan dengan itu masyarakat juga diharapkan lebih selektif dan hati-hati ketika mendapatkan informasi dari media massa atau juga media sosial agar tidak terjebak pada opini atau skenario tertentu yang tidak berdasarkan pada fakta yang sebenarnya.

7. Parapihak yang terlibat konflik bersenjata yakni TNI/POLRI dan TPNPB agar menghentikan aksi kekerasan untuk alasan kemanusiaan yakni menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat sipil dari berbagai profesi, usia, jenis kelamin, etnis maupun agama terutama OAP dan juga Non OAP yang sedang menjalankan aktifitas sehari-hari.
8. Pemerintah Indonesia segera menggelar dialog dengan melibatkan parapihak signifikan yang terlibat dalam konflik di Papua guna menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.

Jayapura.01 Juli 2022

Aliansi demokrasi untuk Papua(AIDP)